

SKRIPSI

**PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DITINJAU DARI MAQASHID
SYARIAH PADA KELURAHAN KASSA KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**FITRI BUHARI
NIM 2220203860202031**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DITINJAU DARI MAQASHID
SYARIAH PADA KELURAHAN KASSA KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**FITRI BUHARI
NIM 2220203860202031**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam
Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Maqashid
Syariah Pada Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Fitri Buhari

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203860202031

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-2734/In.39/FEBl.04/PP.00.9/06/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama
NIP

: Dr. Hj. Ulfa Hidayati, M.M. (.....)
: 19911030 201903 2 016

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Andi Bahri S. M.E., M.Fil.I
NIP. 19781101 200912 1 003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam
Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Maqashid Syariah
Pada Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Fitri Buhari

NIM : 2220203860202031

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Pembimbing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-2734/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

Tanggal Kelulusan : 16 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Ulfa Hidayati, M.M.

(Ketua)

(.....)

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.

(Anggota)

(.....)

Misdar, S.E., M.M.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.

NIP. 19781101 200912 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda (Buhari) dan Ibunda (Rohani) yang menjadi alasan paling utama penulis dalam memperjuangkan pendidikan hingga saat ini. Gelar ini kuperjuangkan untuk Ayahanda dan Ibunda.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan bimbingan yang diberikan oleh Ibu Dr. Hj. Ulfa Hidayati, M.M. selaku pembimbing utama atas bimbingan dan bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penyusunan skripsi ini juga banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah berusaha menjadikan IAIN Parepare menjadi kampus yang lebih baik dan maju.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.l. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Nurfhadillah, M.M. dan bapak Dr. H. Jumaedi, Lc., M.A. selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Umaina, M. E. I. sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.

5. Bapak peguji skripsi Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.l. dan Bapak Misdar, S.E., M.M. yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Ikhsan Gasali, M.S.I. sebagai dosen penasehat akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan di IAIN Parepare.
8. Bapak dan Ibu Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan informasi terkait akademik.
9. Bapak dan Ibu penerima PKH, pendamping sosial PKH, dan tokoh masyarakat yang telah meluangkan waktunya dan membantu penulis untuk menjadi subjek dalam penelitian ini.
10. Seluruh keluarga yang telah menyemangati dan senantiasa memberikan support kepada Penulis selama menyelesaikan tugas akhir melalui nasehatnasehatnya.
11. Teman-teman prodi Ekonomi Syariah (ES) angkatan 2022. Terkhusus kepada Nur Insan Jufri, Nur Winda Oktaviana, dan Rakhmadi yang telah memberikan dukungan berupa ide pikiran maupun tindakan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini terima kasih atas support yang diberikan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
12. Nurkhafifah Anugrah, Sri Indah Wahyuni, dan Niarfah sebagai teman kos yang telah meluangkan waktunya, memberikan bantuan dan selalu kebersamaan penulis dari awal sampai akhir selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
13. Hasrul yang telah memberikan dukungan berupa ide pikiran maupun tindakan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini terima kasih atas support yang diberikan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.

14. *Last but not least*, diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan sejauh ini.

Terima kasih karena tidak menyerah dan melalui masa-masa hancur kemarin dengan sangat baik dan dapat memperbaiki diri dari kesalahan yang sangat merugikan dan menguras energi.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna memberikan perbaikan-perbaikan dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata sebagai penutup, penulis mengucapkan banyak banyak terima kasih semoga bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

Parepare, 29 Mei 2026
12 Dzulhijjah 1447 H

Penulis



Fitri Buhari
Nim. 2220203860202031

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

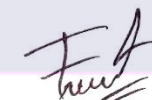
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Buhari
NIM : 2220203860202031
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 14 Agustus 2004
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam
Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Maqashid
Syariah Pada Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sungguh sungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Mei 2026
12 Dzulhijjah 1447 H

Penulis



Fitri Buhari
Nim. 2220203860202031

ABSTRAK

Fitri Buhari, *Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Maqashid Syariah Pada Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang*, (Dibimbing oleh Ibu Ulfa Hidayati)

Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia, termasuk di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang. Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari mendorong pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meninjaunya berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH berperan penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan pangan, pendidikan anak, dan layanan kesehatan. Ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, program ini mendukung penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) melalui pemenuhan kebutuhan kesehatan, penjagaan akal (*hifz al-'aql*) melalui keberlanjutan pendidikan anak, serta penjagaan agama (*hifz al-din*) karena kondisi ekonomi yang lebih baik memberikan ketenangan dalam beribadah. Namun, pelaksanaan PKH masih menghadapi kendala berupa ketidakakuratan data penerima bantuan dan keterlambatan pencairan dana sehingga perlu dilakukan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan Masyarakat, Maqashid Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iiiv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
A. Tujuan Penelitian.....	12
C. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	14
B. Tinjauan Teori	18
C. Kerangka Konseptual.....	33
D. Kerangka Pikir.....	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Hasil Penelitian.....	46
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
BIOGRAFI PENULIS	99

DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Rekap Data DTSEN Tahun 2026	4
4.1	Batassan Wilayan Kelurahan Kassa	43
4.2	Data Jumlah Penduduk Kelurahan Kassa	43
4.3	Besaran Bantuan Program Keluarga Harpan (PKH) per Komponen	45



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	34
3.1	Struktur Pemerintahan Kelurahan Kassa	44



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Lampiran Sk. Pembimbing	Lampiran
2	Pedoman Wawancara	Lampiran
3	Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kampus	Lampiran
4	Surat Permohonan Izin Penelitian dari Pemerintah	Lampiran
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Lampiran
6	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
7	Dokumentasi	Lampiran
8	Biografi Penulis	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Trnsliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

a. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْل : haula

b. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/ـَـيْ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِـيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُـوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

c. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

d. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

e. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

g. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

h. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

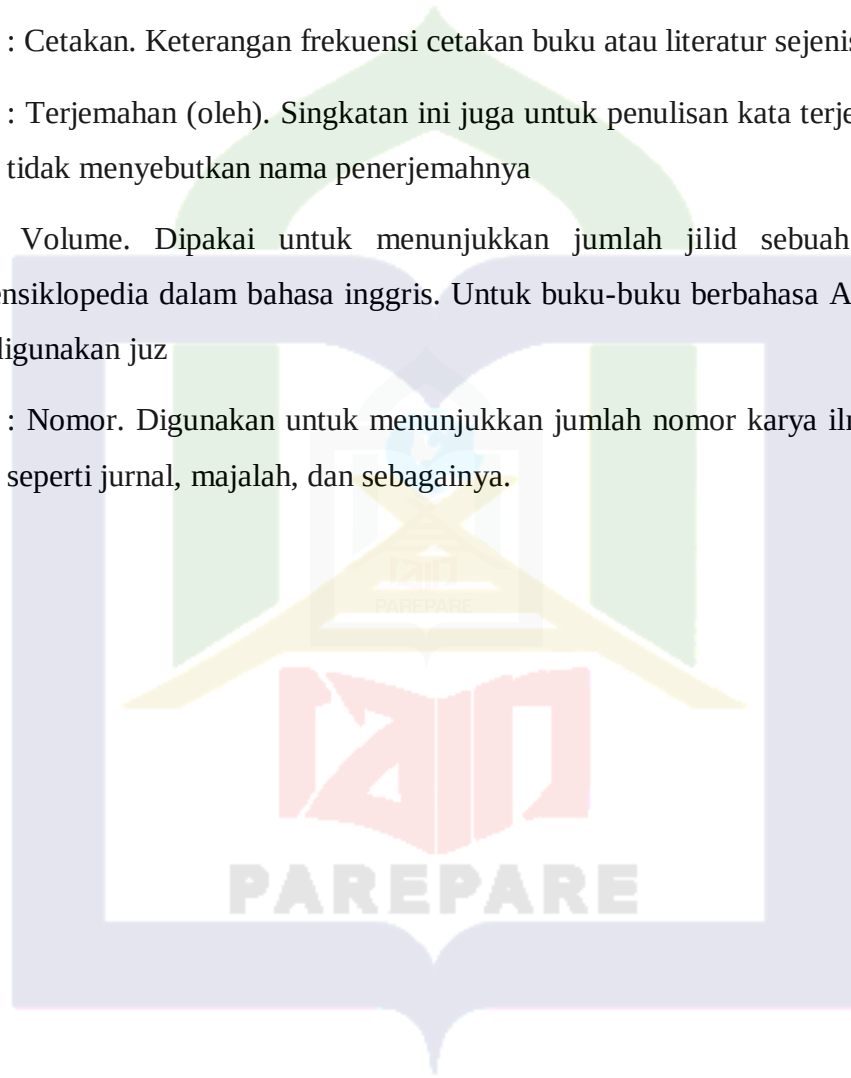
swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta ‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi salah satu persoalan sosial ekonomi yang terus menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2025 tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,47% dari total penduduk, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 23,85 juta orang. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya, sekaligus menjadi salah satu tingkat kemiskinan terendah sejak pencatatan statistik modern di Indonesia. Penurunan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan perlindungan sosial, program bantuan tunai, serta upaya peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi dan penguatan sektor ketenagakerjaan.¹

Meskipun demikian, kemiskinan di Indonesia masih memiliki karakteristik struktural yang kompleks, terutama terkait kesenjangan wilayah, perbedaan kondisi desa dan kota, serta ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan di wilayah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan perkotaan, menunjukkan adanya perbedaan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, tingkat ketimpangan pengeluaran juga masih menjadi tantangan, meskipun indikator gini ratio menunjukkan kecenderungan menurun. Kondisi ini menggambarkan bahwa penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya menghilangkan kesenjangan kesejahteraan antarwilayah dan kelompok masyarakat.²

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki dinamika sosial ekonomi tersendiri, termasuk dalam hal kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan publikasi statistik daerah,

¹ Badan Pusat Statistik, "Tingkat Kemiskinan Kembali Menurun.," 2025.

² Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret.," 2024.

jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2024 mencapai sekitar 420,49 ribu jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk terus berlangsung seiring dengan perkembangan wilayah, mobilitas penduduk, serta aktivitas ekonomi regional yang memengaruhi struktur sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan wilayah, jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan dan potensi munculnya kemiskinan daerah.³

Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang masih menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang tercatat sekitar 33,04 ribu orang atau sekitar 8,55% dari total penduduk sekitar 386 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan bukan hanya persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap layanan publik dan kesempatan kerja yang layak. Secara umum, kondisi ini mencerminkan bahwa pembangunan ekonomi daerah belum sepenuhnya merata dan masih terdapat kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.⁴

Penelitian akademik di Sulawesi Selatan juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan kabupaten/kota sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti tingkat pendidikan masyarakat, struktur ekonomi daerah, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta kualitas pembangunan manusia. Studi yang dilakukan oleh Juardi, Ahmad, dan Iwang menjelaskan bahwa pendidikan dan pertumbuhan ekonomi daerah memiliki hubungan signifikan

³ Juardi, J. dkk., "Analisis Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan," *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 2023, hlm. 14–24.

⁴ Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret."

terhadap penurunan angka kemiskinan.⁵ Selain itu, penelitian Wahyuni mengenai kemiskinan multidimensi di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek pendapatan, tetapi juga dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.⁶ Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pinrang memerlukan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja produktif.

Secara keseluruhan, data statistik daerah menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Kabupaten Pinrang masih menjadi isu pembangunan lokal yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian akademik juga menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya bersifat moneter, tetapi dapat bersifat multidimensi yang mencakup standar hidup, pendidikan, dan akses layanan dasar, terutama pada wilayah perdesaan di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, analisis kemiskinan di Pinrang tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk miskin secara statistik, tetapi juga menyangkut aspek struktural kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.⁷

Kondisi kemiskinan di Kelurahan Kassa berdasarkan Rekap Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSEN menunjukkan bahwa dari total 4.314 individu yang terdata, sebanyak 2.518 individu berada pada kategori Desil 1 sampai Desil 5 yang mencerminkan kelompok miskin dan rentan. Desil dalam rekap DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) adalah pembagian masyarakat menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan atau kemampuan ekonominya,

⁵ Juardi dkk., “Analisis Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan,” *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 2023, hlm. 18–20.

⁶ W. Wahyuni, “Kemiskinan Multidimensi Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020,” *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 2023, 60–63.

⁷ W. Wahyuni, “Kemiskinan Multidimensi Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020,” *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 2023, 57–67.

dari yang paling rendah hingga paling tinggi. Desil 1 berisi keluarga dengan kondisi ekonomi paling rendah dan biasanya menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial, sedangkan desil 10 berisi kelompok dengan kondisi ekonomi paling tinggi. Dengan melihat jumlah keluarga atau individu pada setiap desil, pemerintah dapat mengetahui posisi ekonomi mereka dibandingkan masyarakat lain secara nasional, sehingga penyaluran bantuan seperti BLT, PKH, atau bantuan iuran kesehatan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, adil, dan sesuai kebutuhan kelompok yang paling rentan.⁸

Adapun jumlah masyarakat miskin berdasarkan desil dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	Desil	Jumlah
1	1	233
2	2	628
3	3	408
4	4	429
5	5	820

Gambar 1.1 Rekap Data DTSEN Tahun 2026

Distribusi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh populasi yang terdata masih berada dalam kelompok kesejahteraan rendah hingga rentan, yang dalam perspektif akademik dapat dianalisis menggunakan pendekatan kemiskinan multidimensi sebagaimana dikembangkan oleh Sabina Alkire dan James Foster, yang menekankan pentingnya indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup dalam mengukur kemiskinan secara lebih komprehensif.⁹

⁸ N. Muntazar, "The Impact Evaluation of Income Redistribution on Social Inequality in Indonesia: Propensity Score Matching Approach," *Priviet Social Sciences Journal*, 2026, 73–82.

⁹ Sabina Alkire dan James Foster, "Counting and Multidimensional Poverty Measurement," *Journal of Public Economics*, 2011, 476–87.

Dari jumlah individu miskin tersebut, sebanyak 683 orang tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi keluarga miskin. Meskipun program ini telah menjangkau sebagian masyarakat yang membutuhkan, masih terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah individu miskin (2.518 orang) dan penerima PKH (683 orang). Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan cakupan bantuan atau perbaikan dalam proses validasi data penerima manfaat agar bantuan dapat lebih tepat sasaran.¹⁰

Penentuan siapa yang termasuk miskin dan berhak menerima bantuan tersebut mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola secara nasional oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam sistem ini, kemiskinan tidak hanya dilihat dari pendapatan, tetapi dari kondisi kehidupan secara menyeluruh. Seseorang atau rumah tangga dikatakan miskin apabila mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap layanan dasar lainnya. Data tersebut diperoleh melalui pendataan langsung di lapangan oleh petugas, kemudian diverifikasi oleh pemerintah daerah dan pusat agar hasilnya lebih akurat.¹¹

Dalam praktiknya di Kelurahan Kassa, Dinas Sosial menilai beberapa aspek utama untuk menentukan kondisi kemiskinan. Aspek tersebut meliputi kondisi tempat tinggal, seperti jenis lantai, dinding, dan atap rumah; kepemilikan aset seperti kendaraan atau barang elektronik; sumber penghasilan dan kestabilannya; serta jumlah tanggungan dalam keluarga. Selain itu, juga diperhatikan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,

¹⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Pedoman Program Keluarga Harapan (PKH),” 2021.

¹¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Pedoman Umum Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” 2020.

seperti kecukupan makanan bergizi serta kemampuan membiayai pendidikan dan kesehatan.¹²

Namun demikian, tidak semua masyarakat miskin secara otomatis menjadi penerima PKH. Program ini memiliki kriteria khusus, yaitu diperuntukkan bagi keluarga miskin atau sangat miskin yang juga memiliki komponen tertentu dalam rumah tangganya, seperti ibu hamil, anak usia sekolah, lanjut usia, atau penyandang disabilitas. Dengan demikian, selain kondisi ekonomi, keberadaan anggota keluarga dalam kategori prioritas juga menjadi pertimbangan penting dalam penentuan penerima bantuan.¹³

Perbedaan antara kategori miskin dan sangat miskin terletak pada tingkat keparahan kondisi yang dialami. Keluarga yang tergolong sangat miskin umumnya memiliki penghasilan yang sangat rendah atau tidak tetap, kondisi tempat tinggal yang tidak layak, serta hampir tidak memiliki aset. Mereka juga sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, termasuk kebutuhan pangan. Sementara itu, keluarga miskin masih memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, namun tidak separah kategori sangat miskin.¹⁴

Program Keluarga Harapan (PKH) efektif dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan keluarga miskin. Studi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan evaluasi dampak yang dipublikasikan dalam jurnal internasional menemukan bahwa PKH meningkatkan angka partisipasi sekolah serta kunjungan layanan kesehatan ibu dan anak secara signifikan pada rumah tangga penerima. Salah satu penelitian penting adalah oleh Alatas et al. Dalam *Self-targeting: Evidence from a field experiment in Indonesia*, yang menunjukkan bahwa program bantuan sosial bersyarat di Indonesia,

¹² Badan Pusat Statistik, “Indikator Kemiskinan Indonesia,” 2022.

¹³ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH),” 2021.

¹⁴ World Bank, “Poverty and Shared Prosperity Report,” 2020.

termasuk PKH, berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga miskin dan akses layanan dasar.¹⁵

Penelitian lain yang lebih kontekstual di tingkat daerah dilakukan oleh Novieta dkk. Menemukan bahwa PKH dinilai efektif dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan keluarga penerima manfaat, meskipun masih terdapat tantangan dalam akurasi penargetan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan keluarga terhadap persyaratan pendidikan (kehadiran sekolah) dan kesehatan (imunisasi dan pemeriksaan rutin).¹⁶

Selain itu, studi dalam *Jurnal Dinamika Pembangunan* oleh peneliti Universitas Diponegoro menunjukkan bahwa PKH berpengaruh positif terhadap peningkatan pengeluaran pendidikan dan konsumsi rumah tangga penerima, yang menjadi indikator peningkatan kesejahteraan jangka pendek. Penelitian ini menemukan adanya dampak signifikan terhadap alokasi belanja pendidikan dibandingkan rumah tangga non-penerima. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menyimpulkan bahwa PKH berhasil dalam meningkatkan akses layanan dasar, meskipun dampaknya terhadap kemandirian ekonomi jangka panjang masih memerlukan penguatan kebijakan pendukung.¹⁷

Maqāṣid al-Syarī'ah secara umum merujuk pada tujuan-tujuan utama ditetapkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) bagi manusia. Konsep ini secara klasik dirumuskan oleh Abu Ishaq al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat*, yang membagi maqāṣid ke dalam lima penjagaan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu: menjaga

¹⁵ J Alatas, V., Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., & Tobias, "Self-Targeting: Evidence from a Field Experiment in Indonesia," *American Economic Review: Papers & Proceedings*, 2016, 120–25.

¹⁶ Novieta, E. N. S., "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, Vol. 17, 2020.

¹⁷ E. Y. Khasanah, U., & Purwanti, "Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengeluaran Pendidikan Dan Konsumsi Keluarga Penerima Manfaat Pkh Di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang," (*Doctoral Dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*), 2022.

agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam perkembangan kontemporer, pemikir seperti Jasser Auda menekankan pendekatan sistem (*systems approach*) yang melihat *maqāṣid* sebagai kerangka etis untuk kebijakan publik dan pembangunan sosial.¹⁸ Dalam konteks kebijakan sosial, *maqāṣid al-syarī‘ah* relevan sebagai dasar normatif bagi program pengentasan kemiskinan. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*) tercermin dalam kebijakan bantuan sosial yang menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin.¹⁹

Konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* pada hakikatnya menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Anbiya/ 21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Terjemahnya:

“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam”.²⁰

Dari ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam membawa misi *rahmatan lil ‘alamin*, yaitu menghadirkan kesejahteraan dan perlindungan bagi kehidupan manusia. Selain itu, hadits Rasulullah saw menyatakan bahwa:

ضِرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَا

Artinya:

¹⁸ J. Auda, “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,” *International Institute of Islamic Thought*, 2008.

¹⁹ S. Dusuki, A. W., & Bouheraoua, “The Framework of Maqasid Al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance,” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 3 (2011): 149–160.

²⁰ Al-Qur’an Karim

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain” (HR. Ibnu Majah).²¹

Dari hadist tersebut dapat dipahami sebagai prinsip dasar dalam Islam yang menegaskan pentingnya menjaga keselamatan hidup (jiwa), menjaga kualitas berpikir manusia (akal), serta menjaga praktik keagamaan yang membawa kebaikan (agama). Ketiga aspek ini menjadi bagian penting dalam *maqāṣid al-syarī‘ah* yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik dari sisi fisik, intelektual, maupun spiritual. Dalam perspektif *maqāṣid*, perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) merupakan fondasi utama terciptanya kesejahteraan yang bersifat holistik, tidak hanya material tetapi juga spiritual dan sosial.²²

Dalam konteks kebijakan publik modern, *maqāṣid al-syarī‘ah* telah dikembangkan sebagai kerangka analisis etis untuk menilai efektivitas program sosial, termasuk program pengentasan kemiskinan seperti PKH. Pendekatan kontemporer yang dikemukakan oleh Jasser Auda menekankan bahwa *maqāṣid* harus dipahami secara sistemik dan kontekstual agar relevan dengan pembangunan sosial masa kini.²³ Oleh karena itu, program bantuan sosial yang menjamin akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan ekonomi dapat dipandang sebagai implementasi nyata dari penjagaan akal, jiwa, dan harta dalam *maqāṣid*. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa integrasi *maqāṣid* dalam kebijakan sosial memperkuat orientasi keadilan distributif dan kesejahteraan berkelanjutan.²⁴ Dengan demikian, penggunaan perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam penelitian ini menjadi landasan normatif sekaligus analitis untuk menilai

²¹ Ibnu Majah, “Sunan Ibnu Majah,” Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

²² Asyraf Wajdi Dusuki and Said Bouheraoua, “The Framework of Maqasid Al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance,” *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 2021, 25–28.

²³ Jasser Auda, “Maqasid Al-Shariah and Systems Thinking in Contemporary Policy Reform,” *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12 (2022): 115–118.

²⁴ Siti Rahmawati dan Muhammad Yusuf, “Analisis Program Bantuan Sosial Bersyarat Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah,” *Jurnal Iqtishad: Ekonomi Islam* 15 (2024): 78–82.

sejauh mana PKH benar-benar mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

Hubungan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dianalisis melalui tujuan program tersebut yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan keluarga miskin. Pemberian bantuan bersyarat untuk pendidikan mendukung *ḥifẓ al-'aql* (penjagaan akal), sedangkan bantuan kesehatan ibu dan anak mendukung *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa). Secara konseptual, PKH dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan publik yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid* karena bertujuan menciptakan kemaslahatan dan mengurangi kemiskinan struktural.²⁵

Selain itu, jika dilihat lebih sederhana, hubungan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dipahami sebagai upaya nyata pemerintah dalam menjaga lima kebutuhan dasar manusia secara bertahap. Bantuan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak keluarga miskin membantu mereka tetap bersekolah sehingga masa depan mereka lebih baik, hal ini termasuk bentuk penjagaan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Bantuan kesehatan untuk ibu hamil, balita, dan lansia membantu menjaga keselamatan dan kualitas hidup, yang termasuk penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Bantuan tunai yang diterima keluarga juga membantu memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan biaya hidup, sehingga mendukung penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kebijakan sosial dapat memperkuat keadilan distributif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari aspek sosial dan moral.²⁶ Studi lain juga menegaskan bahwa pendekatan *maqāṣid* dalam

²⁵ M. U. Chapra, "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah," *Islamic Research and Training Institute*, 2008.

²⁶ J Auda, "Maqasid Al-Shariah and Systems Thinking in Contemporary Policy Reform," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12 (2022): 15–18.

kebijakan publik mendorong pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan.²⁷

Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat kesenjangan antara jumlah individu miskin di Kelurahan Kassa (2.518 orang dari 4.314 individu terdata) dengan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang hanya 683 orang, sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai sejauh mana PKH berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Secara empiris, berbagai studi menunjukkan bahwa program bantuan sosial bersyarat seperti PKH berdampak positif terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga miskin, partisipasi pendidikan, serta akses layanan kesehatan, sebagaimana dibuktikan dalam penelitian Alatas et al. dalam *American Economic Review: Papers & Proceedings*,²⁸ serta evaluasi dampak oleh TNP2K yang dipublikasikan dalam jurnal internasional tentang conditional cash transfer di Indonesia.²⁹ Selain itu, penelitian oleh Sparrow et al. dalam *World Development* juga menegaskan bahwa program bantuan tunai bersyarat meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan dan pendidikan pada rumah tangga miskin.³⁰

Selain itu, penelitian ini juga penting karena tidak hanya melihat kesejahteraan dari aspek ekonomi, tetapi juga dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang mencakup penjagaan agama, jiwa, dan akal. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kesejahteraan masyarakat, karena mencakup aspek fisik, intelektual, dan spiritual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi Islam berbasis *maqāṣid* serta menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi

²⁷ M. Rahmawati, S., & Yusuf, "Analisis Program Bantuan Sosial Bersyarat Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī' Ah," *Jurnal Iqtishad: Ekonomi Islam* 18 (2024): 45–47.

²⁸ Rema Hanna, Benjamin A. Olken, dan Ririn Purnamasari, "Performance Pay vs. Input-Based Incentives in Conditional Cash Transfer Programs," *American Economic Review: Papers & Proceedings* 101 (n.d.).

²⁹ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), "Program Keluarga Harapan: Evidence from Impact Evaluation," *Jakarta: TNP2K*, 2012.

³⁰ Robert Sparrow dkk., "Social Health Insurance for the Poor: Targeting and Impact of Indonesia's Askeskin Programme," *World Development*, Vol. 39, 2013, hlm. 845–857.

pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan PKH agar lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat penerima PKH jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana bentuk peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat?

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat penerima PKH berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

C. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan PKH agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi penerima. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat penerima PKH, sehingga dapat membantu dalam perumusan kebijakan dan program sosial yang lebih efektif.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan kebijakan sosial. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik dalam kajian kesejahteraan masyarakat yang dianalisis berdasarkan perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, sehingga memperkaya pemahaman tentang hubungan antara program bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji program bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat dari berbagai pendekatan keilmuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka, atau yang kerap disebut sebagai kajian relevan, merupakan uraian terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau hubungan langsung dengan permasalahan yang sedang dikaji. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap hasil-hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis telah menyajikan sebagian dari referensi tersebut sebagai landasan berpikir yang bersinambungan dengan topik yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Novieta, dkk. dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Manfaat” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas PKH dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga penerima bantuan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap rumah tangga penerima PKH serta analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH terbukti efektif dalam meningkatkan akses pendidikan anak dan layanan kesehatan keluarga, namun masih terdapat kendala dalam akurasi penargetan penerima bantuan dan ketergantungan pada bantuan sosial.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji peran PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan analisis. Penelitian Novieta dkk. berfokus pada efektivitas program secara umum melalui pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih

menekankan analisis kesejahteraan dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pendekatan kualitatif.³¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Lestari dengan judul “*Dampak Program Keluarga Harapan terhadap Pengeluaran Pendidikan dan Konsumsi Rumah Tangga Miskin di Indonesia*” penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh PKH terhadap perubahan pola pengeluaran rumah tangga, khususnya pada sektor pendidikan dan konsumsi dasar. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan *econometric analysis* menggunakan data rumah tangga penerima dan non-penerima PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH berpengaruh positif terhadap peningkatan pengeluaran pendidikan serta konsumsi rumah tangga, yang menjadi indikator peningkatan kesejahteraan jangka pendek.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menilai kontribusi PKH terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya, penelitian Pratama dan Lestari menekankan aspek ekonomi rumah tangga secara kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji kesejahteraan secara lebih luas dan holistik berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* serta kondisi sosial masyarakat penerima.³²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Yusuf dengan judul “*Analisis Program Bantuan Sosial Bersyarat dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian program bantuan sosial pemerintah dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan analisis konseptual terhadap kebijakan bantuan sosial, termasuk PKH. Hasil penelitian menunjukkan

³¹ Novieta, N., Dkk., “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Manfaat,” *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2023.

³² Pratama, R., & Lestari, D., “Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Pengeluaran Pendidikan Dan Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 2022.

bahwa program bantuan sosial bersyarat memiliki kesesuaian dengan prinsip perlindungan jiwa, akal, dan harta, namun implementasinya masih memerlukan peningkatan dalam aspek pemerataan dan keadilan distribusi bantuan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menilai kebijakan bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya, penelitian Rahmawati dan Yusuf bersifat konseptual dan normatif pada level kebijakan nasional, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kondisi empiris masyarakat penerima PKH di tingkat lokal.³³

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Ujung Kota Parepare”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PKH serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara terhadap keluarga penerima manfaat (KPM), pendamping PKH, dan aparat kelurahan, serta dokumentasi data penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, serta dinilai sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Namun, masih ditemukan kendala berupa kurangnya pemahaman sebagian KPM terkait tujuan jangka panjang program dan ketergantungan terhadap bantuan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian terhadap PKH serta pendekatan perspektif ekonomi Islam dalam menilai dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya, penelitian Nur Aisyah lebih menekankan implementasi program secara umum dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik menganalisis kesejahteraan masyarakat berdasarkan

³³ Rahmawati, S., & Yusuf, M., “Analisis Program Bantuan Sosial Bersyarat Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah,” *Jurnal Iqtishad: Ekonomi Islam*, 2024.

indikator *maqāṣid al-syarī'ah* (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*) pada masyarakat Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang.³⁴

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadli dengan judul “*Analisis Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Maqāṣid al-Syarī'ah di Kabupaten Sidrap*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana PKH meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat berdasarkan lima indikator *maqāṣid al-syarī'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH berdampak positif terhadap aspek penjagaan jiwa (akses kesehatan), penjagaan akal (keberlanjutan pendidikan anak), serta penjagaan harta (peningkatan daya beli). Namun, dampaknya terhadap aspek penjagaan agama dan keturunan belum optimal karena masih dipengaruhi faktor lingkungan sosial dan budaya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menganalisis dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus kedalaman analisis. Penelitian Muhammad Fadli dilakukan di Kabupaten Sidrap dengan pendekatan studi kasus umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus secara spesifik pada masyarakat Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang dengan penekanan pada identifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PKH.³⁵

³⁴ Nur Aisyah, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Ujung Kota Parepare,” *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2022.

³⁵ Muhammad Fadli, “Analisis Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Maqāṣid Al-Syarī'ah Di Kabupaten Sidrap,” *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2024.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kesejahteraan (*Welfare Theory*)

Teori kesejahteraan (*welfare theory*) adalah teori yang menjelaskan bagaimana kondisi hidup seseorang atau masyarakat dapat dikatakan baik atau sejahtera. Pada awalnya, kesejahteraan sering diukur dari pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, dalam perkembangan ilmu ekonomi modern, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari uang atau harta, tetapi juga dari kualitas hidup secara menyeluruh. Artinya, seseorang dianggap sejahtera jika ia memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, rasa aman, serta kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *capability approach* yang menekankan bahwa kesejahteraan adalah kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan bermakna.³⁶

Adapun indikator-indikator kesejahteraan biasanya meliputi beberapa aspek utama, yaitu:

1) Pendapatan atau kondisi ekonomi

Pendapatan menggambarkan kemampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Jika pendapatan cukup dan stabil, maka kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik. Sebaliknya, jika pendapatan rendah dan tidak tetap, maka keluarga akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat pendapatan sering digunakan sebagai ukuran awal dalam melihat apakah seseorang termasuk sejahtera atau miskin.

³⁶ Alkire, S., Nogales, R., Quinn, N. N., & Suppa, N., "Global Multidimensional Poverty Index 2023: Unstacking Global Poverty," *Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), University of Oxford*, 2023, 15–20.

Namun, dalam perkembangan teori kesejahteraan modern, pendapatan tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran kesejahteraan. Pendapatan harus dilihat bersama dengan kemampuan daya beli dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan melalui program bantuan sosial dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga dan mengurangi kerentanan ekonomi jangka pendek, tetapi perlu diikuti dengan pemberdayaan ekonomi agar kesejahteraan bersifat berkelanjutan.³⁷

2) Pendidikan.

Pendidikan merupakan indikator penting kesejahteraan karena berhubungan langsung dengan kemampuan seseorang dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya memperoleh pekerjaan yang layak dan pendapatan yang lebih baik. Pendidikan juga membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang rasional, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan kesehatan keluarga.

Dalam pendekatan kemiskinan multidimensi, pendidikan diukur melalui indikator seperti lama sekolah dan partisipasi sekolah anak. Studi *Global Multidimensional Poverty Index (MPI)* tahun 2023 menunjukkan bahwa kekurangan dalam pendidikan masih menjadi faktor utama kemiskinan di berbagai negara berkembang.³⁸ Oleh karena itu, akses pendidikan yang baik menjadi syarat utama dalam meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

³⁷ Muntazar, N., "The Impact Evaluation of Income Redistribution on Social Inequality in Indonesia: Propensity Score Matching Approach," *Priviet Social Sciences Journal* 6 (2026): 44–45.

³⁸ Alkire, S., Nogales, R., Quinn, N. N., & Suppa, N., "Global Multidimensional Poverty Index 2023: Unstacking Global Poverty," *Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), University of Oxford*, 2023, 12–15.

3) Kesehatan.

Kesehatan adalah indikator kesejahteraan yang sangat mendasar karena berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk hidup secara produktif. Jika seseorang memiliki akses terhadap layanan kesehatan, gizi yang cukup, serta lingkungan yang bersih, maka kualitas hidupnya akan lebih baik. Sebaliknya, masalah kesehatan dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan beban ekonomi keluarga.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak memiliki dampak besar dalam mengurangi kemiskinan jangka panjang.³⁹ Dalam konteks kesejahteraan, kesehatan bukan hanya tentang tidak adanya penyakit, tetapi juga tentang kondisi fisik dan mental yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan secara aktif dan bermakna.

4) Kondisi tempat tinggal dan fasilitas dasar.

Kondisi tempat tinggal mencerminkan standar hidup suatu keluarga. Rumah yang layak, akses air bersih, sanitasi yang baik, dan listrik merupakan kebutuhan dasar yang memengaruhi kesehatan dan kenyamanan hidup. Jika suatu keluarga tinggal di rumah yang tidak layak atau tidak memiliki akses air bersih, maka kualitas hidupnya akan rendah meskipun memiliki pendapatan tertentu.

Dalam pengukuran kemiskinan multidimensi, indikator standar hidup mencakup akses terhadap sanitasi, air minum, bahan

³⁹ Sparrow, R., Suryahadi, A., & Widyanti, W., "Social Assistance and Health Service Utilization in Indonesia," *World Development* 140 (2021): 105–110.

bakar memasak, listrik, dan kualitas lantai rumah.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan harus dilihat dari kondisi nyata kehidupan sehari-hari, bukan hanya dari angka pendapatan semata.

5) Partisipasi sosial dan rasa aman.

Kesejahteraan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Seseorang yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, memiliki hubungan sosial yang baik, serta merasa aman dari ancaman kekerasan atau diskriminasi dapat dikatakan lebih sejahtera dibandingkan mereka yang terisolasi secara sosial. Penelitian dalam kajian kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa rasa aman dan keterlibatan sosial berkontribusi terhadap kebahagiaan dan kualitas hidup secara keseluruhan.⁴¹ Oleh karena itu, dalam melihat kesejahteraan masyarakat, perlu diperhatikan aspek sosial seperti solidaritas, dukungan komunitas, dan keamanan lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, indikator ini sering digunakan dalam pengukuran kesejahteraan dan kemiskinan multidimensi untuk melihat kondisi masyarakat secara lebih lengkap, bukan hanya dari satu sisi ekonomi saja.⁴²

a. Konsep Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Menurut Vilfredo Pareto, kesejahteraan dalam ekonomi dapat dilihat dari efisiensi pembagian sumber daya. Melalui konsep *Pareto Optimality*, suatu kondisi dianggap sejahtera apabila tidak ada seseorang yang bisa dibuat lebih baik keadaannya tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Artinya, kesejahteraan dilihat dari keseimbangan

⁴⁰ Alkire, S., Nogales, R., Quinn, N. N., & Suppa, "Global Multidimensional Poverty Index 2023: Unstacking Global Poverty," 2023.

⁴¹ Ugo Corte & Patrik Aspers, "What Is Qualitative in Qualitative Research," *Qualitative Sociology* 45 (2019): 145–147.

⁴² Wahyuni, W., "Kemiskinan Multidimensi Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020," *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 20 (2023): 60–68.

distribusi yang efisien. Konsep ini menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus berusaha memperbaiki kondisi masyarakat tanpa menimbulkan kerugian pada pihak lain. Teori ini menjadi dasar dalam ekonomi kesejahteraan modern, terutama dalam analisis kebijakan publik dan distribusi bantuan sosial.⁴³

Namun, dalam perkembangan ekonomi modern, kesejahteraan tidak hanya dinilai dari pendapatan atau efisiensi distribusi. Amartya Sen melalui *Capability Approach* menjelaskan bahwa kesejahteraan harus dilihat dari kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Artinya, seseorang disebut sejahtera jika ia memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dengan pendekatan ini, program seperti PKH tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga miskin, tetapi juga memperluas akses pendidikan dan kesehatan sehingga meningkatkan kemampuan hidup mereka secara berkelanjutan.⁴⁴

Dalam perspektif ekonomi konvensional kontemporer, konsep kesejahteraan juga semakin berkembang dengan memasukkan dimensi subjektif dan kualitas hidup (*quality of life*) sebagai bagian dari analisis ekonomi. Kesejahteraan tidak hanya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau tingkat pendapatan, tetapi juga melalui indikator seperti kepuasan hidup, akses terhadap layanan publik, perlindungan sosial, serta tingkat ketimpangan. Studi terbaru menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi pendapatan dan perlindungan sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara agregat, terutama bagi kelompok rentan.⁴⁵ Hal ini sejalan dengan pendekatan ekonomi

⁴³ Yew-Kwang Ng, "Happiness Studies and Public Policy," *The Economic Record* 84 (2008): 168–184.

⁴⁴ Sen, A, "Development as Freedom," *Oxford University Press*, 1999.

⁴⁵ Muntazar, N., "The Impact Evaluation of Income Redistribution on Social Inequality in Indonesia: Propensity Score Matching Approach," *Priviet Social Sciences Journal* 6 (2026): 4–6.

kesejahteraan modern yang menekankan pentingnya efisiensi sekaligus keadilan distributif dalam kebijakan publik.⁴⁶ Dengan demikian, dalam ekonomi konvensional, kesejahteraan dipahami sebagai kondisi ketika individu tidak hanya memiliki pendapatan yang cukup, tetapi juga memiliki kesempatan dan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.⁴⁷

b. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, kesejahteraan tidak hanya berarti cukup secara materi, tetapi juga tenang secara spiritual. Istilah yang sering digunakan adalah *falāḥ*, yaitu keberhasilan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Artinya, seseorang dianggap sejahtera bukan hanya karena memiliki penghasilan, tetapi juga karena kehidupannya selaras dengan nilai agama, memiliki keluarga yang baik, serta hidup dalam kondisi sosial yang aman dan bermartabat. Oleh karena itu, kesejahteraan dalam Islam bersifat menyeluruh dan tidak terbatas pada aspek ekonomi saja.⁴⁸

Menurut Abu Hamid al-Ghazali, kesejahteraan akan tercapai apabila lima unsur utama kehidupan manusia terlindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini dikenal sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*. Lima unsur tersebut menjadi ukuran dasar dalam melihat kesejahteraan menurut Islam. Jika suatu kebijakan mampu menjaga pendidikan (akal), kesehatan (jiwa), ekonomi (harta), stabilitas keluarga (keturunan), serta kehidupan beragama, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan mendukung kesejahteraan secara Islam. Dalam penelitian ini,

⁴⁶ S. Alkire, R. Nogales, N. N. Quinn, & N. Suppa, "Global Multidimensional Poverty Index 2023: Unstacking Global Poverty," *Oxford: Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford*, 2023, 10–15.

⁴⁷ Ugo Corte Patrik Aspers, "What Is Qualitative in Qualitative Research," *Qualitative Sociology* 45 (2019): 143–145.

⁴⁸ Chapra, "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah."

PKH dianalisis bukan hanya dari peningkatan pendapatan, tetapi dari sejauh mana program tersebut membantu menjaga lima aspek tersebut.⁴⁹

Selain itu, dalam kajian kontemporer ekonomi Islam, kesejahteraan dipahami sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara seimbang antara aspek material dan spiritual yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan (*maslahah*). Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari terjaminnya akses pendidikan, kesehatan, stabilitas keluarga, serta terpeliharanya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai indikator evaluasi kebijakan publik karena mampu mengintegrasikan dimensi keadilan sosial, distribusi ekonomi, dan pembangunan manusia secara berkelanjutan.⁵⁰ Dengan demikian, kesejahteraan dalam perspektif Islam bersifat holistik dan berorientasi jangka panjang, yaitu menciptakan kehidupan yang bermartabat, adil, serta selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵¹

2. Teori *Maqāṣid Syariah*

a. Konsep Dasar *Maqāṣid*

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dirumuskan secara sistematis oleh Abu Ishaq al-Shatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat*. Secara sederhana, *maqāṣid* berarti tujuan atau maksud ditetapkan hukum Islam. Al-Shatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Artinya, syariat tidak hanya berisi aturan, tetapi memiliki

⁴⁹ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach."

⁵⁰ Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah and Systems Thinking in Contemporary Policy Reform," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12 (2022): 5–7.

⁵¹ Siti Rahmawati dan Muhammad Yusuf, "Analisis Program Bantuan Sosial Bersyarat Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah," *Jurnal Iqtishad: Ekonomi Islam* 15 (2024): 50–52.

tujuan besar untuk menciptakan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera. Dengan memahami *maqāṣid*, hukum Islam tidak dipahami secara kaku, tetapi dilihat dari tujuan kemanusiaannya.⁵²

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menjelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia agar tercipta kesejahteraan dan kemaslahatan. Menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) berarti melindungi kebebasan dan keberlangsungan seseorang dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya tanpa gangguan. Dalam konteks sosial modern, hal ini juga mencakup terciptanya lingkungan yang mendukung nilai moral dan etika. Menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) berarti melindungi kehidupan manusia, seperti menjamin keselamatan, kesehatan, dan kebutuhan dasar agar seseorang dapat hidup dengan layak. Karena itu, program kesehatan, bantuan pangan, dan perlindungan sosial termasuk bentuk nyata penjagaan jiwa.

Selanjutnya, menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) berarti memastikan manusia memiliki akses terhadap pendidikan dan terhindar dari hal-hal yang merusak pikiran, seperti kebodohan atau penyalahgunaan zat berbahaya. Pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan menjadi bagian penting dari tujuan ini. Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) berarti melindungi keberlangsungan generasi melalui perlindungan keluarga, pernikahan yang sah, serta kesehatan ibu dan anak. Terakhir, menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) berarti melindungi hak kepemilikan dan mendorong sistem ekonomi yang adil agar seseorang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa adanya penindasan atau kecurangan. Kelima prinsip ini menjadi dasar dalam menilai apakah suatu kebijakan publik sudah mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁵³

⁵² Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach."

⁵³ J. Auda, "Maqasid Al-Shariah and Systems Thinking in Contemporary Policy Reform," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12 (2022): 25–30.

Al-Shatibi membagi *maqāṣid* ke dalam lima tujuan pokok yang disebut *al-ḍarūriyyāt al-khams*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Lima aspek ini dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus dilindungi agar kehidupan berjalan dengan baik. Jika kelima unsur ini terjaga, maka kesejahteraan manusia akan tercapai secara menyeluruh, baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, *maqāṣid* menjadi indikator kesejahteraan yang bersifat holistik dalam Islam.⁵⁴

b. *Maqashid* Dalam Perspektif Kontemporer

Dalam perkembangan modern, konsep *maqāṣid* tidak hanya digunakan dalam kajian hukum Islam klasik, tetapi juga dikembangkan sebagai kerangka untuk kebijakan publik dan pembangunan sosial. Jasser Auda memperkenalkan pendekatan sistem (*systems approach*) dalam memahami *maqāṣid*. Ia menekankan bahwa *maqāṣid* harus dipahami secara dinamis, kontekstual, dan relevan dengan tantangan zaman. Artinya, nilai-nilai perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dijadikan dasar dalam merancang kebijakan sosial dan ekonomi modern.⁵⁵

Pendekatan ini membuka ruang bagi integrasi antara nilai Islam dan kebijakan negara. Dalam konteks penelitian ini, Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dianalisis sebagai kebijakan publik yang selaras dengan *maqāṣid*. Bantuan kesehatan mencerminkan penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), bantuan pendidikan mencerminkan penjagaan akal (*ḥifẓ al-‘aql*), peningkatan daya beli membantu menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), kesehatan ibu dan anak menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta stabilitas sosial

⁵⁴ Kamali, M. H., “Maqasid Al-Shariah Made Simple,” *Islam and Civilisational Renewal* 1 (2008): 73–84.

⁵⁵ J. Auda, “Maqasid Al-Shariah and Contemporary Reform,” *Islamic Studies Journal*, 2010.

keluarga mendukung penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*). Dengan demikian, PKH dapat dinilai tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan Islami secara menyeluruh.⁵⁶

Dalam perspektif kontemporer, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak lagi dipahami hanya sebagai konsep hukum klasik, tetapi telah berkembang menjadi kerangka etis dalam pembangunan sosial dan kebijakan publik modern. Para akademisi Muslim saat ini melihat *maqāṣid* sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, pemikiran kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda menekankan bahwa *maqāṣid* harus bersifat terbuka, multidimensi, dan mampu menjawab tantangan zaman seperti ketimpangan sosial, krisis ekonomi, dan kemiskinan struktural. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap jiwa tidak hanya berarti menjaga keselamatan fisik, tetapi juga memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Begitu pula perlindungan terhadap akal tidak hanya sebatas larangan terhadap hal yang merusak pikiran, tetapi juga mencakup kewajiban menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin agar mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Sejumlah penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid* dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan sosial negara secara lebih komprehensif. Studi yang dipublikasikan dalam *Journal of Islamic Thought and Civilization* tahun 2022 menjelaskan bahwa penerapan *maqāṣid* dalam kebijakan publik mampu memperkuat orientasi kesejahteraan dan keadilan distributif dalam sistem ekonomi modern.⁵⁷

Selain itu, penelitian Rahmawati dan Yusuf menyimpulkan bahwa program bantuan sosial bersyarat di Indonesia memiliki kesesuaian

⁵⁶ Chapra, "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah."

⁵⁷ J. Auda, "Maqasid Al-Shariah and Systems Thinking in Contemporary Policy Reform," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12 (2022): 1–15.

dengan prinsip penjagaan jiwa, akal, dan harta, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam aspek pemerataan dan ketepatan sasaran.⁵⁸

3. Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau sekelompok masyarakat mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Pada awalnya, kemiskinan sering dipahami hanya sebagai kekurangan pendapatan atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun dalam perkembangan kajian akademik modern, kemiskinan dipahami sebagai persoalan yang lebih luas dan kompleks karena berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan kata lain, kemiskinan tidak hanya menyangkut soal “tidak punya uang”, tetapi juga menyangkut keterbatasan peluang dan kualitas hidup seseorang.⁵⁹

Dalam penelitian kontemporer, para ahli menegaskan bahwa kemiskinan memiliki berbagai bentuk dan dimensi. Oleh karena itu, pengukurannya tidak cukup hanya menggunakan indikator pendapatan, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek sosial dan struktural. Pendekatan modern seperti yang dikembangkan oleh para peneliti di *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI) menunjukkan bahwa kemiskinan dapat dilihat dari kekurangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup secara bersamaan.⁶⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang memerlukan kebijakan

⁵⁸ Rahmawati, S., & Yusuf, M., “Analisis Program Bantuan Sosial Bersyarat Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah,” *Jurnal Iqtishad: Ekonomi Islam* 8 (2024): 45–60.

⁵⁹ W. Wahyuni, “Kemiskinan Multidimensi Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020,” *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 20 (2023): 15–16.

⁶⁰ Alkire, S., Nogales, R., Quinn, N. N., & Suppa, N., “Global Multidimensional Poverty Index 2023: Unstacking Global Poverty,” *Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford.*, 2023, 5–8.

komprehensif, termasuk melalui program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kondisi ketika seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup secara layak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dasar, dan layanan kesehatan. Ukuran kemiskinan ini biasanya ditentukan berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung dari jumlah minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jika pendapatan seseorang berada di bawah garis tersebut, maka ia dikategorikan sebagai miskin secara absolut. Pendekatan ini banyak digunakan oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia dalam mengukur kemiskinan global.

Pendekatan kemiskinan absolut penting karena memberikan gambaran paling dasar tentang kondisi kesejahteraan masyarakat. Namun, pendekatan ini hanya berfokus pada aspek ekonomi dan belum sepenuhnya menggambarkan kualitas hidup secara menyeluruh.⁶¹ Dalam konteks PKH, bantuan tunai berperan dalam membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar tersebut agar mereka dapat keluar dari kondisi kekurangan yang paling mendasar.

Kemiskinan absolut tidak hanya menggambarkan rendahnya pendapatan, tetapi menunjukkan kondisi ketika seseorang benar-benar kesulitan memenuhi kebutuhan hidup paling dasar. Misalnya, tidak mampu membeli makanan bergizi yang cukup setiap hari, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, atau tidak mampu membayar biaya sekolah dasar dan layanan kesehatan. Dalam pengukuran modern, garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan kalori minimum dan kebutuhan non-makanan dasar. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS)

⁶¹ M. Ravallion, "The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy," *Oxford University Press*, 2016.

menghitung garis kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Jika pengeluaran per kapita seseorang berada di bawah garis tersebut, maka ia dikategorikan miskin secara absolut.⁶² Pendekatan ini penting karena memberikan batas yang jelas dan terukur mengenai siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah.

Namun, dalam perkembangan penelitian terbaru, kemiskinan absolut juga dikaitkan dengan kerentanan ekonomi, yaitu kondisi di mana rumah tangga sangat mudah kembali jatuh miskin ketika terjadi guncangan seperti kenaikan harga, sakit, atau kehilangan pekerjaan. Studi terbaru menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan menurun, banyak rumah tangga masih berada sedikit di atas garis kemiskinan sehingga rentan kembali miskin.⁶³ Oleh karena itu, program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran penting dalam mencegah keluarga miskin absolut semakin terpuruk dan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat dari perbandingan kondisi ekonomi seseorang dengan kelompok masyarakat lain di sekitarnya. Seseorang bisa saja mampu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi tetap dianggap miskin jika pendapatannya jauh di bawah rata-rata masyarakat. Pendekatan ini menekankan aspek kesenjangan sosial dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Konsep ini penting karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kekurangan materi, tetapi juga dengan posisi sosial dan akses terhadap peluang ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat menimbulkan masalah sosial seperti rendahnya mobilitas ekonomi dan ketidakadilan

⁶² Statistik, “Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret.”

⁶³ N. Alkire, S., Nogales, R., Quinn, N. N., & Suppa, “Global Multidimensional Poverty Index 2023: Unstacking Global Poverty,” *Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), University of Oxford*, 2023, 12–18.

sosial.⁶⁴ Dalam penelitian ini, analisis kemiskinan relatif membantu memahami bagaimana posisi masyarakat penerima PKH dibandingkan dengan kelompok lain di Kelurahan Kassa.

Kemiskinan relatif tidak hanya berbicara tentang cukup atau tidaknya seseorang memenuhi kebutuhan dasar, tetapi lebih menekankan pada kesenjangan atau jarak kondisi ekonomi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, seseorang dapat dikatakan miskin bukan karena tidak memiliki makanan atau tempat tinggal, melainkan karena tingkat pendapatan, akses pendidikan, dan peluang ekonominya jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata masyarakat di sekitarnya. Menurut laporan *Global Multidimensional Poverty Index 2023* yang diterbitkan oleh *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI), kemiskinan perlu dipahami secara kontekstual karena ketimpangan sosial dapat membatasi partisipasi individu dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara layak, meskipun mereka tidak termasuk miskin secara absolut.⁶⁵

Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang tinggi dalam suatu wilayah dapat memperburuk mobilitas sosial dan memperbesar risiko kemiskinan antargenerasi. Studi Muntazar menjelaskan bahwa redistribusi pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan sosial di Indonesia, yang secara tidak langsung berdampak pada pengurangan kemiskinan relatif.⁶⁶ Artinya, kebijakan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya berfungsi membantu pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga berperan dalam memperkecil kesenjangan antar kelompok masyarakat.

⁶⁴ P. Townsend, "Poverty in the United Kingdom," *University of California Press*, 1979.

⁶⁵ Sabina Alkire, Ricardo Nogales, Natalie Quinn, & Nicolai Suppa, "Global Multidimensional Poverty Index 2023: Unstacking Global Poverty," *Oxford: Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford*, 2023, 15–18.

⁶⁶ N. Muntazar, "The Impact Evaluation of Income Redistribution on Social Inequality in Indonesia: Propensity Score Matching Approach," *Priviet Social Sciences Journal* 6 (2026): 22–24.

Dengan demikian, analisis kemiskinan relatif menjadi penting dalam penelitian ini untuk melihat posisi ekonomi masyarakat penerima PKH dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain di Kelurahan Kassa.

c. Kemiskinan Multidimensi

Kemiskinan multidimensi dikembangkan oleh Sabina Alkire dan James Foster melalui metode *Multidimensional Poverty Index (MPI)*. Pendekatan ini menjelaskan bahwa kemiskinan tidak cukup diukur hanya dari pendapatan, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Tiga dimensi utama dalam MPI adalah pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Setiap dimensi memiliki indikator tertentu, seperti lama sekolah, status gizi, akses air bersih, listrik, dan kondisi rumah.

Pendekatan ini lebih komprehensif karena mampu menunjukkan bentuk kekurangan yang dialami masyarakat secara lebih nyata. Seseorang bisa saja memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan, tetapi tetap mengalami kekurangan dalam pendidikan atau kesehatan.⁶⁷

Selain digunakan pada tingkat global, pendekatan kemiskinan multidimensi juga banyak diterapkan pada tingkat nasional dan daerah untuk melihat kondisi masyarakat secara lebih rinci. Pendekatan ini membantu pemerintah mengetahui bentuk kekurangan apa yang paling dominan dialami masyarakat, apakah pada aspek pendidikan, kesehatan, atau standar hidup. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat sasaran. Misalnya, jika suatu daerah memiliki tingkat kekurangan pendidikan yang tinggi, maka program bantuan sekolah dan peningkatan akses pendidikan perlu diprioritaskan. Laporan *Global Multidimensional Poverty Index (MPI)* terbaru menunjukkan bahwa kemiskinan sering kali

⁶⁷ Foster, "Counting and Multidimensional Poverty Measurement."

saling terkait antar dimensi, sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu, bukan hanya melalui bantuan pendapatan semata.⁶⁸

Di Indonesia sendiri, pengukuran kemiskinan multidimensi mulai banyak digunakan dalam penelitian akademik untuk melengkapi data kemiskinan moneter dari Badan Pusat Statistik. Studi terbaru menunjukkan bahwa beberapa rumah tangga yang tidak tergolong miskin secara pendapatan ternyata masih mengalami deprivasi dalam akses sanitasi, pendidikan, atau layanan kesehatan.⁶⁹ Artinya, kemiskinan tidak selalu terlihat dari rendahnya penghasilan, tetapi juga dari keterbatasan kualitas hidup. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, pendekatan kemiskinan multidimensi sangat relevan untuk menganalisis kondisi masyarakat Kelurahan Kassa secara lebih komprehensif, terutama dalam menilai sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) mampu mengurangi berbagai bentuk kekurangan tersebut.

C. Kerangka Konseptual

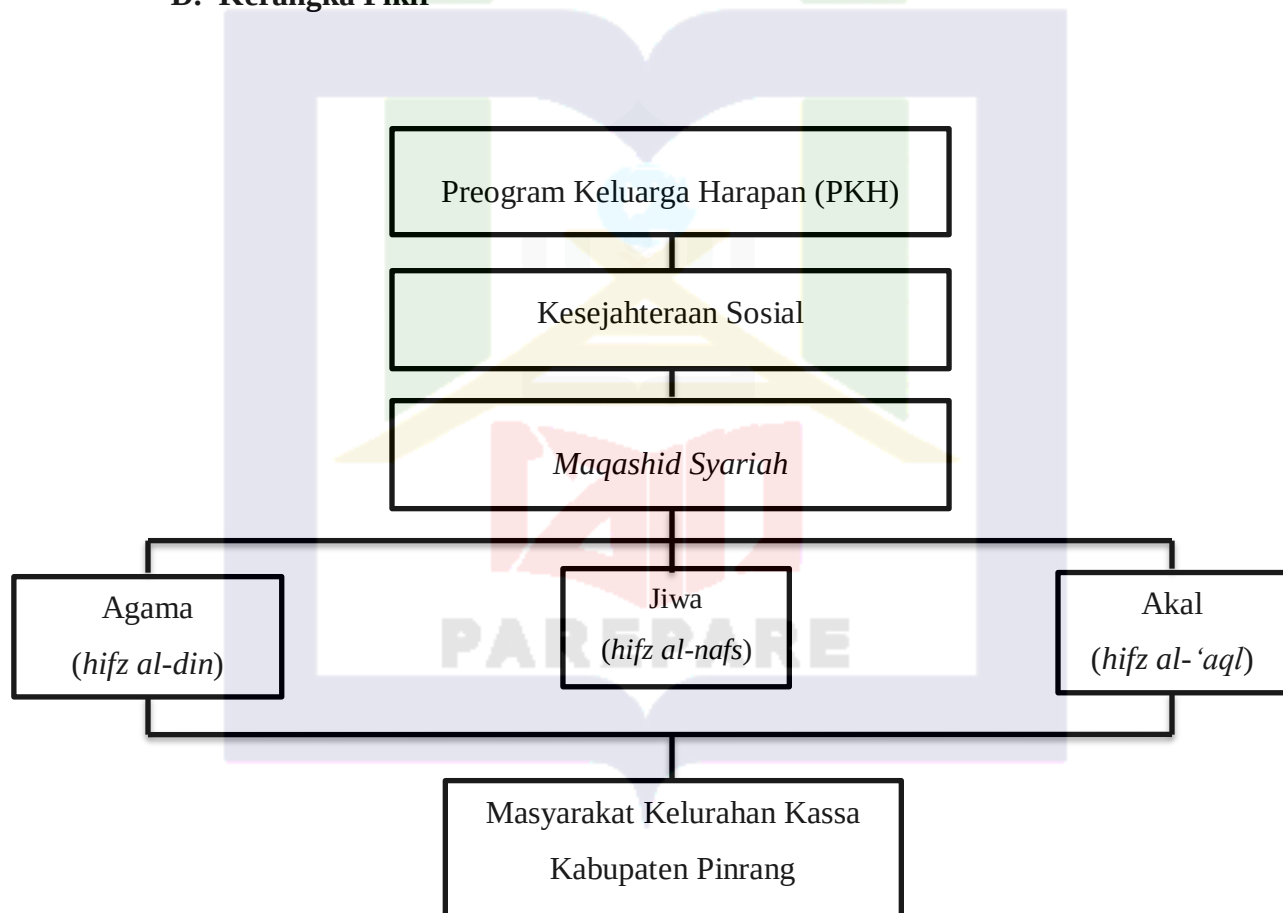
Penelitian ini berangkat dari teori kesejahteraan, teori kemiskinan, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara konseptual, Program Keluarga Harapan (PKH) diposisikan sebagai variabel utama (kebijakan publik) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Berdasarkan teori kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan tidak hanya dilihat dari pendapatan, tetapi juga dari kualitas hidup seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, teori kemiskinan multidimensi menjelaskan bahwa kemiskinan mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, bukan hanya ekonomi semata. Oleh karena itu, analisis terhadap PKH tidak cukup hanya melihat bantuan tunai, tetapi harus melihat dampaknya secara menyeluruh.

⁶⁸ Alkire, S., Nogales, R., Quinn, N. N., & Suppa, "Global Multidimensional Poverty Index 2023: Unstacking Global Poverty," 2023.

⁶⁹ Wahyuni, W., "Kemiskinan Multidimensi Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020," *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 20 (2023): 45–47.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang dirumuskan oleh Abu Ishaq al-Shatibi dan dikembangkan secara kontemporer oleh Jasser Auda, kesejahteraan diukur melalui lima indikator utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penelitian ini saya hanya menggunakan tiga indikator saja yaitu agama, jiwa, dan akal. Maka secara konseptual, PKH dianalisis sebagai program yang berpotensi: menjaga jiwa (melalui bantuan kesehatan), menjaga akal (melalui bantuan pendidikan), serta mendukung stabilitas keluarga yang berkaitan dengan penjagaan agama.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari fokus penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam peran PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menilai dampaknya berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.⁷⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kassa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang cukup signifikan, karakteristik masyarakat yang mayoritas beragama Islam dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat, kondisi sosial-ekonomi yang beragam dengan mata pencaharian utama sebagai petani, buruh, dan pedagang kecil, serta aksesibilitas lokasi yang memadai dan ketersediaan data administratif yang baik untuk mendukung penelitian lapangan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan waktu kurang lebih 2 bulan, bulan Mei-Juni. Jangka waktu penelitian ini bisa bertambah atau berkurang menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan data yang diperlukan oleh peneliti.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan proposal penelitian yang telah disusun, fokus penelitian ini adalah menganalisis peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam

⁷⁰ Ugo Corte Patrik Aspers, "What Is Qualitative in Qualitative Research," *Qualitative Sociology* 42 (2019): 139–160.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menilai tingkat kesejahteraan tersebut berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang meliputi penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang. Penelitian ini juga berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan PKH dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kelurahan Kassa yang berjumlah 683 individu penerima berdasarkan data DTSEN, serta pihak terkait seperti pendamping sosial PKH dan tokoh masyarakat setempat.

D. Jenis dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian kualitatif umumnya berupa hasil wawancara atau observasi terhadap apa yang dikatakan dan diperbuat oleh narasumber. Di samping itu, tersedia pula data tambahan berupa dokumen dan sejenisnya. Berikut adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Dalam pengumpulan sumber data penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung dan wawancara.⁷¹ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Sosial PKH di Kelurahan Kassa, dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Setempat.

2. Data Skunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang atau instansi lain, sehingga peneliti tidak mengambilnya secara langsung dari lapangan. Data ini bisa berupa pustaka, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan catatan lain yang relevan guna

⁷¹ A. Maolani Rukaesih dan Cahyana Ucu, "Metodologi Penelitian Pendidikan," Jakarta: PT Raju Grafindo Persada, 2015, 65.

melengkapi pembahasan. Sebagai salah satu pendukung, penelitian ini juga menggunakan data dari Kantor Kelurahan Kassa, Kabupaten Pinrang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses perolehan data menjadi fondasi penting dalam kegiatan riset, mengingat tujuan fundamental dari penelitian adalah menghasilkan temuan berbasis informasi yang akurat. Ketidaktahuan akan teknik pengumpulan yang sesuai dapat berakibat pada data yang diperoleh tidak mencapai persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan.⁷² Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang di kumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara suatu bentuk komunikasi verbal, berupa tanya jawab untuk mendapatkan sebuah informasi dari informan. Apabila dilihat dari segi pertanyaan maka diantara wawancara kuesioer terdapat persamaan dalam hal keduanya, yakni wawancara dan kuesioner menggunakan pertanyaan-pertanyaan hanya cara penyajiaanya saja yang berbeda. Dalam wawancara Semi Terstruktur, Wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara kemudian peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri mana isu yang dimunculkan.⁷³

⁷² Haris Hardiansyah, “Wawancara, Observasi, Dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif,” *Cet I, Jakarta: Rajawali Pers*, 2013, 131.

⁷³ Endang Widi Winarni, “Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK,R & D,” *Jakarta: Bumi Aksara*, 2018, 163–64.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan informan sebagai sumber utama untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kassa. Informan yang dipilih berjumlah 7 orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan program tersebut. Informan tersebut terdiri dari beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, pendamping sosial PKH, serta tokoh masyarakat setempat. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus penelitian. Melalui wawancara terhadap para informan ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai peran PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.⁷⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen baik itu berbentuk foto, berkas, dan lain sebagainya yang berada di lembaga atau institusi, lokasi di mana sebuah masalah diteliti. Data-data yang digunakan dapat berupa dokumen yang masih dipergunakan maupun dokumen yang telah berlalu. Data dapat diperoleh dari sumber-sumber perpustakaan ataupun ditempat-tempat dimana dokumen tersebut berada.⁷⁵

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan sebagai bukti bahwa penelitian yang dilakukan benar penelitian yang ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang telah diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan:

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁷⁵ Endang Widi Winarni, "Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK,R & D.," Jakarta: Bumi Aksara, 2018, 167.

Uji *credibility* (validitas interbal) *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

1. Uji Kreadibilitas (*Credibility*) atau derajat kepercayaan dalam penelitian kualitatif adalah istilah istilah validitas yang berarti instrumen yang digunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.
2. *Transferability* (keteralihan), berarti hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama. *Transferability* berkaitan dengan hasil penelitian yang mana dapat diaplikasikan atau digunakan dalam situasi lain. Untuk mendapatkan derajat keteralihan yang tinggi maka sangat tergantung pada kemampuan peneliti mengangkat makna-makna esensial temuannya dalam penelitian dan melakukan refleksi serta analisis kritis yang ditujukan dalam pembahasan penelitian. Agar orang lain dapat menerapkan hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan penelitian tersebut ditempat lain.
3. *Dependability/reliabilitas* (Kebergantungan), artinya menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian tersebut dilakukan berulang kali. *Dependability* dilakukan dengan menggunakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan sumber data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, pengambilan atau pembangkitan dan membuat sebuah kesimpulan.
4. *Confirmability/Objektivitas* (Kepastian), penelitian kualitatif secara umum dapat dikatakan obyektif apabila hasil penelitiannya telah disepakati banyak pihak. Uji obyektivitas/*confirmability* hampir mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan bila hasil penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Mengujinya dengan keseluruhan proses dan hasil penelitian sehingga

diperoleh kepastian. Pengujian ini dilakukan oleh seorang dosen pembimbing atau auditor yang independen untuk mendapatkan hasil yang efektif dan objektif.⁷⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana persepsi dan pengalaman keluarga penerima manfaat (KPM) terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kassa dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan faktor-faktor apa saja yang menghambat optimalisasi peran PKH dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Kassa sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Peneliti yang masih baru dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.⁷⁷

2. Model/Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah kedua dalam analisis data model ini adalah model atau penyajian data. Model/Penyajian data (*display*) dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori, *Flowchart* dan sejenisnya. Dalam kehidupan sehari-hari berbeda-

⁷⁶ Haleluddin & Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik," Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray, 2019, 134–41.

⁷⁷ Endang Widi Winarni, "Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D.," Jakarta: Bumi Aksara, 2018, 173.

beda dalam pengukuran surat kabar, bensin sampai layar komputer. Membuat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan-tindakan yang didasarkan pada pemahaman tersebut.⁷⁸

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dalam aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi, pola-pola, dan proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan ini secara jelas memelihara kejujuran dan kecurigaan, tetapi kesimpulan masih jasmu, baru mulai dan pertama masih samar, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar menggunakan istilah klasikal. Kesimpulan akhir mungkin tidak terjadi hingga pengumpulan data selesai tergantung pada ukuran korpus dan catatan lapangan, penyimpanan, pengodean, pengalaman peneliti, metode-metode perbaikan yang digunakan.

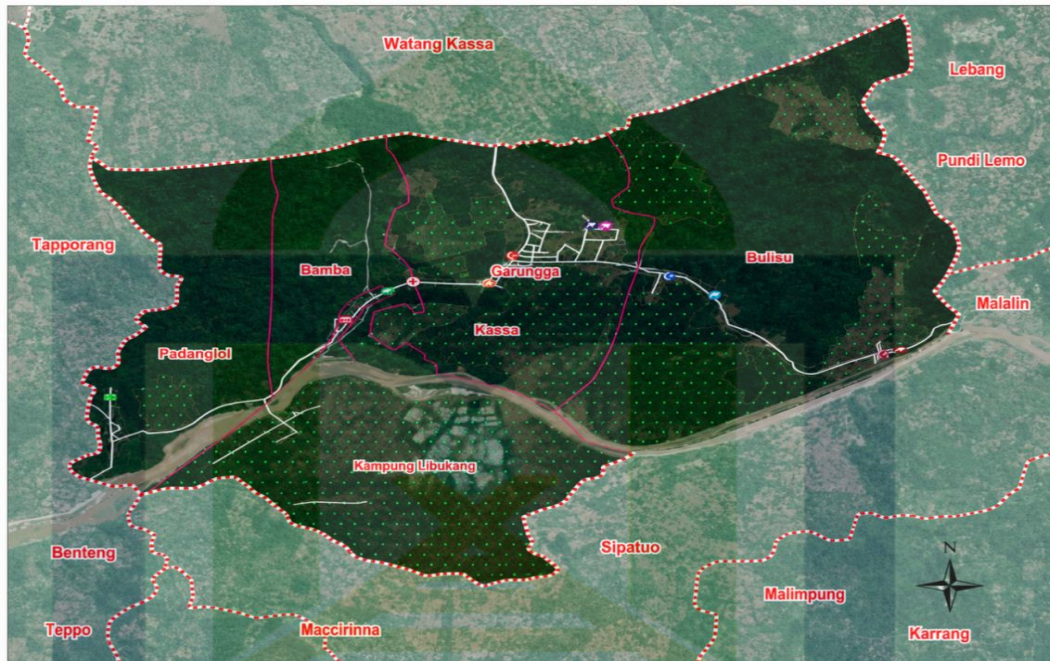
⁷⁸ Endang Widi Winarni.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Letak Geografis



Kelurahan Kassa merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Secara geografis, Kelurahan Kassa memiliki luas wilayah sekitar 3.150 hektar dan berada di daerah pegunungan. Kondisi wilayah yang berbukit ini membuat sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Adapun batas wilayah Kelurahan Kassa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Watang Kassa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sipatuo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Tapporang, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Malaling.

Tabel 4.1 Batasan Wilayan Kelurahan Kassa

Letak Batas	Kelurahan/Kelurahan
Sebelah Utara	Desa Watang Kassa
Sebelah Selatan	Desa Sipatuo
Sebelah Barat	Desa Tapporang
Sebelah Timur	Desa Malaling

Sumber: Pegawai kantor kelurahan kassa

Dari segi kependudukan, Kelurahan Kassa terdiri dari beberapa lingkungan dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda. Lingkungan Garungga memiliki jumlah penduduk sebanyak 991 jiwa, Bulisu sebanyak 847 jiwa, Bamba sebanyak 654 jiwa, dan Padanglolo sebanyak 409 jiwa. Total jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa setiap lingkungan memiliki tingkat kepadatan yang berbeda, namun tetap hidup berdampingan sebagai satu kesatuan masyarakat Kelurahan Kassa.

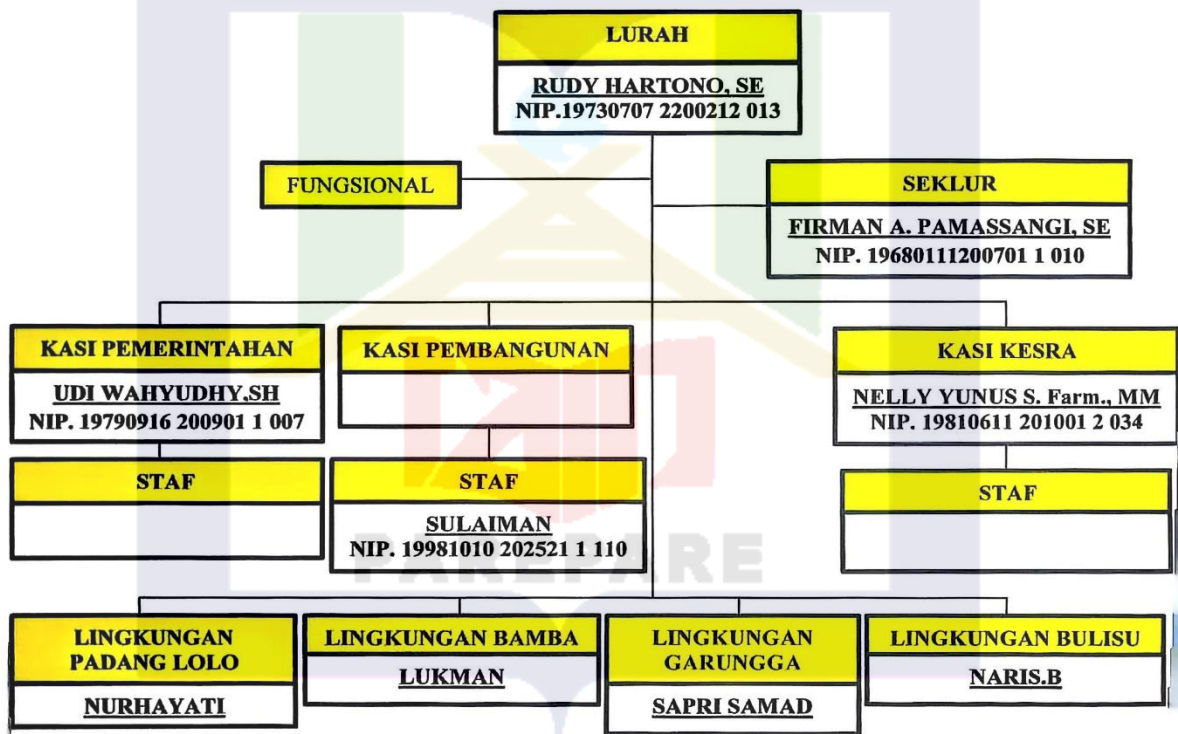
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Kelurahan Kassa

Nama Lingkungan	Jumlah	
	L	P
Garungga	496	495
Bulisu	424	423
Bamba	327	327
Padanglolo	205	204

Sumber: Pegawai kantor kelurahan kassa

Masyarakat di Kelurahan Kassa pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, serta peternak skala rumah tangga. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh letak geografis wilayah yang berada di daerah pegunungan dengan lahan yang cukup luas dan subur. Oleh karena itu, sektor pertanian dan perkebunan menjadi sumber utama penghidupan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN KASSA KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG



Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Kelurahan Kassa

Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) menyalurkan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat dengan nominal yang berbeda-beda setiap kategorinya. Bantuan diberikan secara rutin setiap tiga bulan sekali dan diakumulasikan menjadi total bantuan per tahun. Berikut adalah rincian besaran bantuan PKH yang diterima oleh keluarga penerima manfaat di Kelurahan Kassa berdasarkan komponen keluarga:

Tabel 4.3 Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) per Komponen

No	Bantuan Komponen Setiap Jiwa	Jumlah Bantuan 3 Bulan Sekali Setiap Jiwa	Jumlah Bantuan Pertahun Setiap Jiwa
1	Ibu Hamil	Rp. 750.000	Rp. 3.000.000
2	Balita Anak ke 1 dan 2	Rp. 750.000	Rp. 3.000.000
3	SD	Rp. 225.000	Rp. 900.000
4	SMP	Rp. 375.000	Rp. 1.500.000
5	SMA	Rp. 500.000	Rp. 2.000.000
6	Lansia	Rp. 600.000	Rp. 2.400.000
7	Disabilitas	Rp. 600.000	Rp. 2.400.000

Sumber: Pendamping Sosial PKH

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa bantuan PKH diberikan secara berbeda-beda sesuai dengan komponen keluarga yang menjadi sasaran program. Ibu hamil dan balita (anak pertama dan kedua) masing-masing menerima bantuan sebesar Rp 750.000 per tiga bulan, yang jika diakumulasikan

sepanjang tahun menjadi Rp 3.000.000. Bantuan Pendidikan untuk anak tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp 225.000 per tiga bulan atau total Rp 900.000 per tahun. Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), bantuan dinaikkan menjadi Rp 375.000 per tiga bulan (Rp 1.500.000 pertahun), sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) bantuan yang diberikan sebesar Rp 500.000 per tiga bulan atau setara dengan Rp 2.000.000 per tahun. Selain itu, kelompok lansia dan penyandang disabilitas masing-masing menerima bantuan sebesar Rp 600.000 per tiga bulan yang jika dijumlahkan setiap tahunnya mencapai Rp 2.400.000. Perbedaan nominal bantuan ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing komponen.

Anak usia pendidikan dasar membutuhkan biaya yang lebih ringan dibandingkan jenjang yang lebih tinggi, sehingga bantuan SMP dan SMA lebih besar. Sementara itu, ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas mendapatkan perhatian khusus karena termasuk kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan gizi yang lebih intensif. Dengan adanya bantuan ini, keluarga penerima manfaat di Kelurahan Kassa memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan secara lebih teratur, sehingga program ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga agama (*hifz al-dīn*).

B. Hasil Penelitian

1. Tingkat kesejahteraan masyarakat penerima PKH berdasarkan perspektik *Maqashid Syariah*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada penerima manfaat PKH, pendamping sosial, dan tokoh masyarakat di Kelurahan Kassa, dapat diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Jika ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, khususnya aspek *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-'aql* (menjaga akal), program ini telah memberikan manfaat yang nyata bagi keluarga penerima manfaat. Seperti yang dikatakan oleh pendamping PKH Pak Ardi bahwa:

“Tujuan PKH bukan hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat agar lebih mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah. Selain itu, melalui pertemuan rutin P2K2, pendamping juga menyampaikan nilai-nilai sosial dan keagamaan kepada para penerima manfaat”.⁷⁹

Dalam aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), PKH membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sebagian besar informan menyatakan bahwa bantuan PKH sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Ibu Suburia mengatakan bahwa:

“Bantuan PKH membantu untuk keperluan dapur”.⁸⁰

Sementara Ibu Sanaria menjelaskan bahwa:

“Dana PKH sering digunakan untuk membeli kebutuhan pokok dan melakukan pemeriksaan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS”.⁸¹

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Hartati yang menyebutkan bahwa:

“Bantuan PKH sangat meringankan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari”.⁸²

Kondisi ini menunjukkan bahwa PKH berperan dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan masyarakat penerima manfaat.

Pada aspek *hifz al-'aql* (menjaga akal), PKH turut mendukung pendidikan anak-anak penerima manfaat. Bantuan yang diberikan

⁷⁹ Ardi Pendamping PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

⁸⁰ Suburia Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

⁸¹ Sanaria Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

⁸² Hartati Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, buku, alat tulis, serta biaya transportasi ke sekolah. Ibu Sanaria mengungkapkan bahwa:

“Dana PKH sangat membantu kebutuhan pendidikan anak saya”.⁸³

sedangkan Ibu Parida menyatakan bahwa:

“Bantuan tersebut cukup meringankan biaya sekolah anak-anak”.⁸⁴

Selain itu, Pak Ardi menjelaskan bahwa:

“Salah satu kategori utama PKH memang ditujukan untuk mendukung pendidikan anak mulai dari tingkat SD hingga SMA”.⁸⁵

Dengan adanya bantuan pendidikan ini, anak-anak memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh pendidikan yang layak sehingga tujuan menjaga akal melalui peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai.

Dalam aspek *hifz al-din* (menjaga agama), bantuan PKH memberikan dampak positif terhadap ketenangan hidup penerima manfaat sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik. Ibu Sanaria menyatakan bahwa:

“Setelah menerima bantuan PKH, beban pikirannya terkait kebutuhan pendidikan anak menjadi berkurang sehingga saya lebih tenang dan khusyuk dalam beribadah”.⁸⁶

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Ina dan Ibu Hartati yang merasa lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena sebagian kebutuhan keluarga telah terbantu.⁸⁷

Selain itu, pendamping PKH juga secara rutin memberikan pembinaan yang memuat pesan-pesan keagamaan dalam setiap pertemuan

⁸³ Sanaria Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

⁸⁴ Parida Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

⁸⁵ Ardi Pendamping PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

⁸⁶ Sanaria Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

⁸⁷ Ina dan Hartati Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

kelompok. Dengan demikian, PKH tidak hanya membantu secara ekonomi tetapi juga mendukung ketenangan batin dan kehidupan keagamaan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat penerima PKH di Kelurahan Kassa mengalami peningkatan yang cukup baik. Program PKH telah membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memberikan ketenangan dalam menjalankan kehidupan dan ibadah sehari-hari. Oleh karena itu, jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah, pelaksanaan PKH telah berkontribusi dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui upaya menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*).

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kassa. Faktor pendukung yang utama adalah adanya kerja sama yang baik antara pemerintah kelurahan, pendamping sosial PKH, dan masyarakat penerima manfaat. Pendamping sosial PKH, Pak Ardi, menjelaskan bahwa:

*“Koordinasi dengan pihak kelurahan sangat membantu dalam proses pengusulan dan pendampingan keluarga penerima manfaat sehingga bantuan dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya kegiatan pendampingan dan pertemuan kelompok secara rutin juga menjadi faktor penting karena dapat memberikan arahan kepada masyarakat agar lebih mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan sosial”.*⁸⁸

Faktor pendukung lainnya adalah manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan. Sebagian besar informan menyatakan

⁸⁸ Ardi Pendamping PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

bahwa bantuan PKH sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga, biaya pendidikan anak, serta kebutuhan kesehatan. Ibu Sanaria mengungkapkan bahwa:

*“Dana PKH sering digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, biaya sekolah anak, serta pemeriksaan kesehatan”.*⁸⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Hartati yang menyatakan bahwa:

*“Bantuan PKH sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjamin pendidikan anak, dan membuat kondisi keluarga menjadi lebih baik”.*⁹⁰

Selain itu, Pak Lukman selaku tokoh masyarakat juga menilai bahwa:

*“PKH telah memberikan perubahan positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan”.*⁹¹

Di sisi lain, pelaksanaan PKH juga masih menghadapi beberapa hambatan. Menurut Pak Ardi, kendala yang sering terjadi adalah kesulitan dalam menentukan penerima bantuan yang benar-benar layak karena masih ada masyarakat yang tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi dan aset yang dimiliki. Selain itu, praktik kedekatan keluarga atau nepotisme dalam proses pendataan juga dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.⁹²

Hambatan lainnya berasal dari sisi penerima manfaat. Beberapa informan menyampaikan bahwa jumlah bantuan yang diterima terkadang tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Ibu Sanaria menyatakan bahwa:

*“Jadwal pencairan bantuan yang terkadang tidak menentu juga menjadi kendala bagi penerima manfaat”.*⁹³

⁸⁹ Sanaria Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

⁹⁰ Hartati Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

⁹¹ Lukman Tokoh Masyarakat, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

⁹² Ardi Pendamping PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

⁹³ Sanaria Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

Sementara itu, Ibu Parida mengungkapkan bahwa:

*“Masih terdapat keluarga kurang mampu yang belum terdaftar sebagai penerima PKH sehingga bantuan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang membutuhkan”.*⁹⁴

Pak Lukman juga menambahkan bahwa:

*“Masih terdapat beberapa permasalahan terkait data penerima yang perlu diperbaiki oleh pemerintah agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran”.*⁹⁵

Pelaksanaan PKH didukung oleh kerja sama antara pemerintah, pendamping sosial, dan masyarakat serta manfaat bantuan yang dirasakan langsung oleh penerima. Namun, program ini masih menghadapi hambatan berupa ketepatan sasaran penerima bantuan, ketidakakuratan data, keterlambatan pencairan bantuan, serta jumlah bantuan yang terkadang belum mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Oleh karena itu, perbaikan dalam pendataan dan penyaluran bantuan perlu terus dilakukan agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

3. Bentuk peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Kassa. Berdasarkan hasil wawancara, bantuan PKH tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, tetapi juga mendukung pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta memberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendamping sosial PKH, Pak Ardi, menjelaskan bahwa:

⁹⁴ Parida Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

⁹⁵ Lukman Tokoh Masyarakat, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

*“Tujuan PKH bukan sekadar memberikan bantuan uang, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial. Selain itu, melalui kegiatan pendampingan dan pertemuan kelompok, penerima manfaat diberikan pembinaan agar mampu meningkatkan kualitas hidup keluarganya”.*⁹⁶

Dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar, sebagian besar penerima manfaat mengaku bahwa bantuan PKH sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Ibu Suburia menyatakan bahwa:

*“Bantuan PKH membantu memenuhi kebutuhan dapur dan kebutuhan sehari-hari keluarga”.*⁹⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sanaria yang mengatakan bahwa:

*“Dana PKH sering digunakan untuk membeli kebutuhan pokok keluarga”.*⁹⁸

Sementara itu, Ibu Hartati menjelaskan bahwa:

*“Bantuan PKH sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan makanan, sembako, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya”.*⁹⁹

Kondisi ini menunjukkan bahwa PKH berperan dalam membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga kesejahteraan keluarga dapat meningkat.

Selain membantu kebutuhan sehari-hari, PKH juga berperan dalam meningkatkan akses pendidikan anak. Berdasarkan hasil wawancara, banyak penerima manfaat menggunakan bantuan PKH untuk membeli perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, buku, alat tulis, serta biaya transportasi sekolah. Ibu Sanaria mengungkapkan bahwa:

*“Dana PKH sangat membantu kebutuhan pendidikan anak”.*¹⁰⁰

sedangkan Ibu Parida menyatakan bahwa:

⁹⁶ Ardi Pendamping PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

⁹⁷ Suburia Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

⁹⁸ Sanaria Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

⁹⁹ Hartati Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

¹⁰⁰ Sanaria Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

*“Bantuan tersebut mampu meringankan biaya sekolah anak-anak”.*¹⁰¹

Menurut Ibu Hartati bahwa:

*“Bantuan pendidikan dalam PKH dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah sesuai jenjang pendidikan anak. Dengan adanya bantuan ini, anak-anak dari keluarga penerima manfaat dapat terus bersekolah dan memperoleh pendidikan yang lebih baik.”*¹⁰²

Dalam bidang kesehatan, PKH juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Beberapa penerima manfaat menyampaikan bahwa bantuan PKH membantu mereka memperoleh layanan kesehatan dengan lebih mudah. Ibu Sanaria menjelaskan bahwa:

Dana PKH sering digunakan untuk pemeriksaan kesehatan rutin yang tidak ditanggung oleh BPJS”.¹⁰³

Selain itu, Ibu Hartati mengaku bahwa:

*“Setelah menerima PKH, keluarganya lebih aktif memanfaatkan fasilitas kesehatan”.*¹⁰⁴

Hal ini sejalan dengan penjelasan Pak Ardi yang menyatakan bahwa:

*“PKH memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil, balita, penyandang disabilitas, dan lanjut usia sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat”.*¹⁰⁵

Lebih lanjut, bantuan PKH juga memberikan dampak psikologis dan sosial bagi keluarga penerima manfaat. Beberapa informan mengaku merasa lebih tenang karena beban ekonomi keluarga berkurang. Ibu Sanaria menyatakan bahwa:

*“Bantuan PKH membuatnya lebih tenang dalam beribadah karena tidak terlalu khawatir memikirkan biaya pendidikan anak”.*¹⁰⁶

¹⁰¹ Parida Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

¹⁰² Hartati Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

¹⁰³ Sanaria Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

¹⁰⁴ Hartati Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

¹⁰⁵ Ardi Pendamping PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

¹⁰⁶ Sanaria Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Parida, Ibu Hartati, dan Ibu Ina yang merasa lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari setelah menerima bantuan PKH. Dengan berkurangnya tekanan ekonomi, masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih fokus pada kesejahteraan keluarga.¹⁰⁷

Program Keluarga Harapan (PKH) berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta memberikan rasa aman dan ketenangan bagi keluarga penerima bantuan. Program ini terbukti membantu masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup dan mendukung terciptanya kesejahteraan yang lebih baik di Kelurahan Kassa.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tingkat kesejahteraan masyarakat penerima PKH berdasarkan perspektik *Maqashid Syariah*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Peningkatan kesejahteraan tersebut tidak hanya terlihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya akses pendidikan, kesehatan, ketahanan keluarga, serta kondisi psikologis masyarakat yang menjadi lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga penerima manfaat menggunakan bantuan PKH untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga seperti pangan, biaya sekolah anak, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Selain

¹⁰⁷ Parida, Hartati dan Ina Penerima PKH, Kelurahan Kassa, Wawancara Mei 2026

itu, masyarakat juga merasakan adanya penurunan tekanan ekonomi sehingga kualitas hidup keluarga mengalami perbaikan.

Temuan tersebut menjawab masalah penelitian yang diangkat, yaitu bagaimana peran PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan apakah program tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Permasalahan kemiskinan yang masih dihadapi masyarakat menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak cukup hanya dipahami sebagai distribusi dana, tetapi harus mampu menciptakan kemaslahatan dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup secara bertahap.¹⁰⁸

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan teori kesejahteraan sosial (*social welfare theory*) yang menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan sosial, dan kualitas hidup yang lebih baik. Menurut pendekatan *capability* yang dikembangkan Amartya Sen, kesejahteraan merupakan kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan produktif. Dalam konteks penelitian ini, bantuan PKH telah memperluas kemampuan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2024* (Jakarta: Kemensos RI, 2024).

¹⁰⁹ N. Muntazar, "The Impact Evaluation of Income Redistribution on Social Inequality in Indonesia: Propensity Score Matching Approach," *Priviet Social Sciences Journal*, Vol. 6 No. 1 (2026), hlm. 73–82.

Jika dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH memiliki relevansi terhadap beberapa tujuan utama syariat. Pertama, pada aspek *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), bantuan PKH membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dan memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Terjemahannya:

*“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*¹¹⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari tujuan syariat. Hasil penelitian membuktikan bahwa PKH berkontribusi terhadap perlindungan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

Kedua, pada aspek *hifẓ al-‘aql* (menjaga akal), hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan PKH membantu keberlanjutan pendidikan anak melalui pemenuhan biaya sekolah dan kebutuhan pendidikan lainnya. Pendidikan menjadi sarana penting dalam membangun kualitas manusia dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa manfaat PKH tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga investasi sosial jangka panjang.

¹¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 195.

Temuan tersebut didukung oleh penelitian Siti Rahmawati dan Muhammad Yusuf yang menyatakan bahwa program bantuan sosial bersyarat memiliki keterkaitan dengan pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah* terutama dalam menjaga jiwa, akal, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa bantuan sosial yang disertai pendampingan mampu meningkatkan kapasitas keluarga penerima manfaat dalam jangka panjang.¹¹¹

Ketiga, pada aspek *hifz al-dīn* (menjaga agama), hasil penelitian menemukan bahwa perbaikan kondisi ekonomi memberikan dampak terhadap ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah. Salah satu informan menyampaikan bahwa bantuan PKH membuat mereka lebih fokus menjalankan ibadah karena tidak terlalu terbebani oleh kebutuhan pendidikan dan kebutuhan keluarga sehari-hari.

Kondisi tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Quraissy/106: 3–4.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ ؕ

Terjemahannya:

*“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.”*¹¹²

Ayat ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi dan rasa aman memiliki hubungan dengan kualitas pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, PKH secara tidak langsung ikut mendukung terwujudnya ketenangan spiritual masyarakat.

¹¹¹ Siti Rahmawati dan Muhammad Yusuf, “Analisis Program Bantuan Sosial Bersyarat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *Jurnal Iqtishad: Ekonomi Islam*, Vol. 15 No. 2 (2024), hlm. 78–85.

¹¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Quraissy [106]: 3–4.

Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian Novieta dkk. yang menemukan bahwa PKH efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Namun, penelitian ini memberikan pengembangan analisis karena menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga kesejahteraan tidak hanya dipahami secara ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial masyarakat.¹¹³

Selain memberikan manfaat, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan PKH masih menghadapi beberapa hambatan seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterbatasan nominal bantuan, keterlambatan pencairan, serta adanya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak dapat dicapai hanya melalui bantuan tunai, tetapi perlu didukung dengan pendampingan yang efektif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.¹¹⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kassa telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* melalui upaya menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga agama. Namun demikian, keberhasilan program tetap memerlukan perbaikan sistem pendataan, penguatan pendampingan, dan strategi pemberdayaan ekonomi agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

¹¹³ Siti Rahmawati dan Muhammad Yusuf, “Analisis Program Bantuan Sosial Bersyarat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *Jurnal Iqtishad: Ekonomi Islam*, Vol. 15 No. 2 (2024), hlm. 78–85.

¹¹⁴ Nurul Hidayah, “Ketergantungan Penerima Bantuan Sosial dan Tantangan Pemberdayaan Ekonomi,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 11 No. 2 (2025), hlm. 133–141.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan program, koordinasi antar pihak yang terlibat, serta kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan bantuan secara tepat.¹¹⁵

Faktor pendukung utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya kerja sama dan koordinasi yang cukup baik antara pemerintah kelurahan, pendamping sosial PKH, dan keluarga penerima manfaat (KPM). Dalam pelaksanaannya, pendamping PKH tidak hanya berfungsi mengawasi proses penyaluran bantuan, tetapi juga berperan sebagai pendidik dan fasilitator yang memberikan arahan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak, pemanfaatan layanan kesehatan, serta pengelolaan bantuan agar digunakan sesuai kebutuhan keluarga. Melalui pendampingan tersebut, masyarakat tidak hanya menerima bantuan dalam bentuk dana, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara bertahap.¹¹⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara rutin mampu membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai investasi jangka panjang. Sebagian keluarga penerima manfaat menyatakan bahwa setelah menerima pendampingan, mereka menjadi lebih disiplin menyekolahkan

¹¹⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2024* (Jakarta: Kemensos RI, 2024).

¹¹⁶ Nurul Hidayah, "Pemberdayaan dan Kemandirian Penerima Bantuan Sosial," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 11 No. 2 (2025), hlm. 133–141.

anak dan lebih aktif memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan PKH tidak hanya terletak pada bantuan tunai, tetapi juga pada proses perubahan perilaku masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Secara teoritis, temuan penelitian ini sejalan dengan teori kesejahteraan sosial (*social welfare theory*) yang menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan atau bantuan ekonomi semata, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui akses pendidikan, kesehatan, dan penguatan kapasitas sosial. Menurut teori pemberdayaan sosial, bantuan sosial akan lebih efektif apabila disertai proses pendampingan sehingga masyarakat dapat berkembang menjadi lebih mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.¹¹⁷

Selain itu, faktor pendukung lainnya yang ditemukan adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan sebagai syarat utama dalam pelaksanaan PKH. Program ini mendorong keluarga penerima untuk memastikan anak tetap bersekolah dan anggota keluarga memanfaatkan layanan kesehatan secara rutin. Hal tersebut menunjukkan bahwa PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan kualitas sumber daya manusia. Temuan ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* khususnya *hifẓ al-'aql* (menjaga akal) melalui pendidikan dan *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) melalui pemeliharaan kesehatan.¹¹⁸

¹¹⁷ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Oxford University Press), digunakan kembali dalam kajian kesejahteraan sosial kontemporer periode 2021–2025.

¹¹⁸ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2024* (Jakarta: Kemensos RI, 2024).

Kondisi tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Ra'd/13: 11.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ١١

Terjemahannya:

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”*¹¹⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat memerlukan usaha bersama antara bantuan yang diberikan dan kemauan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Dalam konteks penelitian ini, bantuan PKH menjadi sarana pendukung, sedangkan keberhasilan peningkatan kesejahteraan tetap bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH. Hambatan pertama adalah masih ditemukannya ketidakakuratan data penerima bantuan sehingga terdapat masyarakat yang seharusnya menerima bantuan namun belum terdaftar, sementara sebagian penerima lainnya dinilai sudah tidak memenuhi kriteria tetapi masih memperoleh bantuan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa validitas data menjadi faktor penting dalam keberhasilan program kesejahteraan.¹²⁰

Hambatan kedua adalah kurang terbukanya sebagian masyarakat dalam melaporkan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya. Beberapa keluarga belum memperbarui data ketika kondisi ekonominya telah mengalami perubahan sehingga berdampak pada ketepatan sasaran

¹¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Ar-Ra'd [13]: 11.

¹²⁰ Dewi Sartika dan Irfan Maulana, “Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial,” *Jurnal Kebijakan Sosial*, Vol. 6 No. 1 (2024), hlm. 76–83.

program. Situasi ini menyebabkan distribusi bantuan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Hambatan berikutnya adalah keterlambatan pencairan bantuan dan keterbatasan nominal bantuan jika dibandingkan dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat. Sebagian informan menyampaikan bahwa bantuan yang diterima memang membantu kebutuhan rumah tangga, tetapi belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki fungsi sebagai pendukung kesejahteraan, bukan sebagai sumber penghidupan utama masyarakat.¹²¹

Temuan tersebut menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Kassa belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh masyarakat miskin yang membutuhkan. Artinya, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan tunai, tetapi juga membutuhkan sistem pendataan yang akurat, pengawasan yang baik, pendampingan yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan kemandirian masyarakat.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Muhammad Fadli yang menyatakan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan dipengaruhi oleh faktor implementasi program, kualitas pendampingan sosial, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik bahwa di Kelurahan Kassa persoalan administrasi dan validitas data menjadi

¹²¹ Nurul Hidayah, "Pemberdayaan dan Kemandirian Penerima Bantuan Sosial," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 11 No. 2 (2025), hlm. 133–141.

hambatan yang paling dominan dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat.¹²²

3. Bentuk peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Peran tersebut tidak hanya terlihat dari pemberian bantuan dalam bentuk dana, tetapi juga terlihat dari perubahan kondisi kehidupan masyarakat yang menjadi lebih baik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, serta perubahan pola pikir menuju kehidupan yang lebih mandiri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat merasakan bahwa bantuan PKH mampu mengurangi beban ekonomi keluarga dan memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sebelumnya sulit dijangkau.¹²³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk peran pertama dari Program Keluarga Harapan adalah sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Sebagian besar informan menyampaikan bahwa dana PKH digunakan untuk membeli kebutuhan pokok rumah tangga seperti makanan, sembako, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan kesehatan keluarga. Salah satu penerima manfaat menyampaikan bahwa bantuan PKH sangat membantu memenuhi kebutuhan dapur dan kebutuhan sehari-hari keluarga, sementara informan lainnya menjelaskan bahwa bantuan tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan pokok dan menunjang kehidupan rumah tangga.

¹²² Muhammad Fadli, “Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, Vol. 8 No. 2 (2023), hlm. 121–130.

¹²³ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2024* (Jakarta: Kemensos RI, 2024), hlm. 15–21.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa PKH berfungsi sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam teori kesejahteraan sosial (*social welfare theory*), kesejahteraan dipahami sebagai kondisi ketika individu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak, memperoleh akses terhadap pelayanan sosial, serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Bantuan sosial seperti PKH tidak hanya bertujuan mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh kemampuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi secara bertahap.¹²⁴

Bentuk peran kedua yang ditemukan adalah meningkatnya akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan PKH digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti pembelian perlengkapan belajar, pembayaran biaya pendidikan, dan menunjang keberlangsungan pendidikan anak. Pendamping sosial PKH juga menjelaskan bahwa tujuan program tidak hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga membentuk pola pikir masyarakat agar lebih mandiri melalui pendampingan dan pembinaan secara berkala.¹²⁵

Temuan ini sejalan dengan teori modal manusia (*human capital theory*) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai salah satu cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi karena melalui pendidikan seseorang memiliki peluang yang lebih besar untuk

¹²⁴ N. Muntazar, "The Impact Evaluation of Income Redistribution on Social Inequality in Indonesia: Propensity Score Matching Approach," *Priviet Social Sciences Journal*, Vol. 6 No. 1 (2026), hlm. 73–82.

¹²⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2024* (Jakarta: Kemensos RI, 2024), hlm. 15–21.

memperoleh kehidupan yang lebih baik.¹²⁶ Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut sejalan dengan konsep *hifẓ al-'aql* (menjaga akal), yaitu upaya menjaga dan mengembangkan kualitas manusia melalui pendidikan dan pengetahuan.¹²⁷

Hal tersebut juga sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Mujādilah/58: 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ۝ ۱۱

Terjemahannya:

*“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”*¹²⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kedudukan penting dalam Islam sebagai sarana peningkatan kualitas hidup manusia. Dengan demikian, peran PKH dalam mendukung pendidikan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia.

Selain pendidikan, bentuk peran PKH juga terlihat pada peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, bantuan PKH membantu keluarga memenuhi kebutuhan pemeriksaan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak. Adanya persyaratan dalam PKH yang mewajibkan penerima memanfaatkan layanan kesehatan membuat masyarakat menjadi lebih sadar terhadap pentingnya menjaga

¹²⁶ Nurul Hidayah, “Pemberdayaan dan Kemandirian Penerima Bantuan Sosial,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 11 No. 2 (2025), hlm. 133–141.

¹²⁷ Siti Rahmawati dan Muhammad Yusuf, “Analisis Program Bantuan Sosial Bersyarat dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*,” *Jurnal Iqtishad*, Vol. 15 No. 2 (2024), hlm. 78–85.

¹²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Mujādilah [58]: 11.

kesehatan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa PKH tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih sehat.¹²⁹

Jika dikaitkan dengan teori pembangunan manusia (*human development theory*), kesehatan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan karena masyarakat yang sehat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial.¹³⁰ Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut berkaitan dengan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), yaitu menjaga keberlangsungan hidup manusia melalui pemenuhan kebutuhan kesehatan.¹³¹

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
١٩٥

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”¹³²

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga kesehatan dan keberlangsungan hidup merupakan bagian dari tujuan syariat yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial.

Selain berperan dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, penelitian ini juga menemukan bahwa PKH memberikan dampak psikologis berupa rasa aman dan ketenangan bagi keluarga penerima manfaat. Beberapa informan menyampaikan bahwa setelah menerima

¹²⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2024* (Jakarta: Kemensos RI, 2024), hlm. 15–21.

¹³⁰ N. Muntazar, “The Impact Evaluation of Income Redistribution on Social Inequality in Indonesia: Propensity Score Matching Approach,” *Priviet Social Sciences Journal*, Vol. 6 No. 1 (2026), hlm. 73–82.

¹³¹ Siti Rahmawati dan Muhammad Yusuf, “Analisis Program Bantuan Sosial Bersyarat dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*,” *Jurnal Iqtishad*, Vol. 15 No. 2 (2024), hlm. 78–85.

¹³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 195.

bantuan PKH mereka merasa lebih tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan tidak terlalu khawatir terhadap kebutuhan pendidikan anak maupun kebutuhan rumah tangga. Bahkan terdapat penerima manfaat yang menyampaikan bahwa bantuan PKH membuat mereka lebih tenang dalam menjalankan ibadah karena tekanan ekonomi berkurang.

Temuan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga dari terciptanya rasa aman dan ketenangan hidup. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut berkaitan dengan *hifẓ al-dīn* (menjaga agama), karena kestabilan ekonomi dapat mendukung masyarakat menjalankan ibadah dan kehidupan sosial dengan lebih baik.¹³³

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Novieta dkk. yang menyimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat. Namun penelitian ini memberikan temuan yang lebih luas karena tidak hanya menilai efektivitas program dari aspek ekonomi, tetapi juga mengkaji dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan spiritual melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.¹³⁴

Jika dikaitkan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran PKH di Kelurahan Kassa telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Akan tetapi, peningkatan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan persoalan kemiskinan karena kesejahteraan yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan bantuan

¹³³ Siti Rahmawati dan Muhammad Yusuf, “Analisis Program Bantuan Sosial Bersyarat dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*,” *Jurnal Iqtishad*, Vol. 15 No. 2 (2024), hlm. 78–85.

¹³⁴ Novieta dkk., “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Manfaat,” *Jurnal Kebijakan Sosial*, Vol. 9 No. 1 (2023), hlm. 45–58.

tunai, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat, pendampingan yang konsisten, serta kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, bentuk peran PKH tidak hanya sebagai program bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dengan demikian dapat penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kassa telah berjalan dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat penerima manfaat, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Program dilaksanakan melalui mekanisme penetapan penerima manfaat, penyaluran bantuan, serta pendampingan sosial oleh pendamping PKH. Pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan tunai, tetapi juga mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban pendidikan dan kesehatan sebagai syarat keberlangsungan bantuan. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pelaksanaan PKH telah mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan masyarakat terutama pada aspek *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) melalui pemenuhan kebutuhan hidup dan kesehatan serta *hifẓ al-'aql* (menjaga akal) melalui peningkatan akses pendidikan.
2. Faktor pendukung dan penghambat menjadi unsur yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kassa. Faktor pendukung utama meliputi adanya koordinasi antara pemerintah kelurahan, pendamping sosial PKH, dan keluarga penerima manfaat serta meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Pendampingan yang dilakukan secara rutin turut membantu membentuk kesadaran masyarakat untuk lebih mandiri dan meningkatkan kualitas hidup. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa hambatan, seperti ketidakakuratan data penerima bantuan, kurangnya keterbukaan masyarakat dalam pelaporan kondisi ekonomi, keterlambatan pencairan bantuan, serta

keterbatasan nominal bantuan dibanding kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola program dan sistem pendataan yang tepat sasaran.

3. Bentuk peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat terlihat melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta perubahan pola pikir masyarakat menuju kehidupan yang lebih mandiri. Bantuan PKH membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga, mendukung keberlangsungan pendidikan anak, meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan, serta memberikan rasa aman dan ketenangan dalam kehidupan keluarga. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, peran tersebut menunjukkan keterkaitan dengan tujuan syariat yaitu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), dan *hifz al-dīn* (menjaga agama). Dengan demikian, PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan secara sosial, ekonomi, dan spiritual.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan validasi data penerima manfaat agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang tepat sasaran. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan yang dapat menyebabkan masih adanya masyarakat miskin yang belum menerima bantuan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan serta melakukan evaluasi secara rutin dalam pelaksanaan PKH agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Pendamping sosial diharapkan dapat lebih memperkuat edukasi mengenai kemandirian ekonomi kepada masyarakat penerima manfaat, sehingga

mereka tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Masyarakat juga diharapkan mampu mulai mengembangkan usaha atau kegiatan ekonomi mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, perlu adanya peningkatan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa, pendamping sosial, dan lembaga terkait agar pelaksanaan program PKH dapat berjalan lebih lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al Karim

Al-Quran dan Terjemahannya Departemen Agama Islam: 2019.

Aisyah, Nur. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Ujung Kota Parepare." *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2022.

Azim, Muhammad Haerul. "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan di Kelurahan Watang Soreang Parepare." *Diss. IAIN Parepare*, 2024.

Alatas, V., Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., & Tobias, J. "Self-Targeting: Evidence from a Field Experiment in Indonesia." *American Economic Review: Papers & Proceedings*, 2016.

Alkire, S., Nogales, R., Quinn, N. N., & Suppa, N. "Global Multidimensional Poverty Index 2023: Unstacking Global Poverty." *Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), University of Oxford*, 2023.

Auda, J. "Maqasid Al-Shariah and Contemporary Reform." *Islamic Studies Journal*, 2010.

Auda, J. "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." *International Institute of Islamic Thought*, 2008.

Auda, Jasser. "Maqasid Al-Shariah and Systems Thinking in Contemporary Policy Reform." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12 (2022).

Aefih, Nur. "Distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Parepare." *Diss. IAIN Parepare*, 2023.

Bank, World. "Poverty and Shared Prosperity Report," 2020.

Bouheraoua, Asyraf Wajdi Dusuki and Said. "The Framework of Maqasid Al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance." *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 2021.

Chapra, M. U. "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah." *Islamic Research and Training Institute*, 2008.

- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. "The Framework of Maqasid Al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 3 (2011).
- Endang Widi Winarni. "Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK,R & D." *Jakarta: Bumi Aksara*, 2018.
- Fadli, Muhammad. "Analisis Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Maqāṣid Al-Syarī'ah Di Kabupaten Sidrap." *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2024.
- Alkire, Sabina, dan James Foster. "Counting and Multidimensional Poverty Measurement." *Journal of Public Economics* 95, no. 7–8 (2011).
- Fitria. "Analisis hukum Islam terhadap efektivitas program keluarga harapan (studi di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang). " *Diss. STAIN Parepare*, 2017.
- Fadli, Muhammad. "Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Hardiansyah, Haris. "Wawancara, Observasi, Dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif." *Cet I, Jakarta: Rajawali Pers*, 2013.
- Hidayah, Nurul. "Pemberdayaan dan Kemandirian Penerima Bantuan Sosial." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 11, No. 2, 2025.
- Hidayati, Ulfa, Mahlia Muis, dan Muzran Munizu. "Pengaruh Kepemimpinan Etika dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Dosen: Peran Perilaku Berbicara dan Kepribadian di Universitas Keagamaan Negeri di Selatan." *Budaya Ilmiah*, Vol. 12, No. 5, 2026.
- Hatta, Ulya, et al. "Tinjauan Prinsip ~ Adalah Terhadap Kontestasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Baranti Kab. Sidenreng Rappang." *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 6.1 (2026).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. "Pedoman Program Keluarga Harapan (PKH)," 2021.

- Kementerian Sosial Republik Indonesia. “Pedoman Umum Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” 2020.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH),” 2021.
- Juardi, J., Ahmad, M. A. A., & Iwang, B. “Analisis Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan.” *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 2023.
- Kamali, M. H. “Maqasid Al-Shariah Made Simple.” *Islam and Civilisational Renewal* 1 (2008).
- Khasanah, U., & Purwanti, E. Y. “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengeluaran Pendidikan Dan Konsumsi Keluarga Penerima Manfaat Pkh Di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.” (*Doctoral Dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*), 2022.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2024*. Jakarta: Kemensos RI, 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Majah, Ibnu. “Sunan Ibnu Majah.” Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Muntazar, N. “The Impact Evaluation of Income Redistribution on Social Inequality in Indonesia: Propensity Score Matching Approach.” *Priviet Social Sciences Journal*, Vol. 6, No. 1, 2026.
- Ng, Yew-Kwang. “Happiness Studies and Public Policy.” *The Economic Record* 84 (2008).
- Novieta, N., Dkk. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Manfaat.” *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2023.
- Nurfadilah. “Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.” *Diss. IAIN Parepare*, 2024.

- Nurhidayanti. "Program Keluarga Harapan Di Desa Rante Alang Kecamatan Larompong Perspektif Masalah Mursalah." *Diss. IAIN Parepare*, 2025.
- Patrik Aspers, Ugo Corte. "What Is Qualitative in Qualitative Research." *Qualitative Sociology* 45 (2019).
- Pratama, R., & Lestari, D. "Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Pengeluaran Pendidikan Dan Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Pembangunan.*, 2022.
- Rahmawati, S., & Yusuf, M. "Analisis Program Bantuan Sosial Bersyarat Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah." *Jurnal Iqtishad: Ekonomi Islam* 8 (2024).
- Ravallion, M. "The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy." *Oxford University Press*, 2016.
- Rema Hanna, Benjamin A. Olken, dan Ririn Purnamasari. "Performance Pay vs. Input-Based Incentives in Conditional Cash Transfer Programs." *American Economic Review: Papers & Proceedings* 101 (n.d.).
- Robert Sparrow, Asep Suryahadi, dan Wenefrida Widyanti. "Social Health Insurance for the Poor: Targeting and Impact of Indonesia's Askeskin Programme." *World Development* 39 (2013).
- S. Alkire, R. Nogales, N. N. Quinn, & N. Suppa. "Global Multidimensional Poverty Index 2023: Unstacking Global Poverty." *Oxford: Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford*, 2023.
- Sen, A. "Development as Freedom." *Oxford University Press*, 1999.
- Sparrow, R., Suryahadi, A., & Widyanti, W. "Social Assistance and Health Service Utilization in Indonesia." *World Development* 140 (2021).
- Statistik, Badan Pusat. "Indikator Kemiskinan Indonesia," 2022.
- Statistik, Badan Pusat. "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret.," 2024.
- Statistik, Badan Pusat. "Tingkat Kemiskinan Kembali Menurun.," 2025.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Townsend, P. "Poverty in the United Kingdom." *University of California Press*,

1979.

(TNP2K), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. “Program Keluarga Harapan: Evidence from Impact Evaluation.” *Jakarta: TNP2K*, 2012.

Ucu, A. Maolani Rukaesih dan Cahyana. “Metodologi Penelitian Pendidikan.” *Jakarta: PT Raju Grafindo Persada*, 2015.

Wahyuni, W.. “Kemiskinan Multidimensi Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.” *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 20 (2023).

Wijaya, Halleluddin & Hengki. “Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik.” *Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray*, 2019.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SK. Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : B-611/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2026

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bahwa dipandang perlu untuk membentuk Tim Penguji Seminar Proposal;
 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberi tugas sebagai tindak lanjut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018, tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018, Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
 7. Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 145 Tahun 2025, tentang penguji Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Memperhatikan : 1. Kalender Akademik Tahun 2025-2026 Nomor : 183 Tahun 2025
 2. Berdasarkan Pendaftaran Seminar dari Mahasiswa (i):
 Nama : FITRI BUHARI
 NIM. : 2220203860202031
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul : PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH KELURAHAN KASSA KABUPATEN PINRANG

Memberikan Tugas

Kepada : Tim Seminar dengan komposisi sebagai berikut:
 Ketua : Hj. Ulfa Hidayati, M.M.
 Anggota : Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.
 Misdar, S.E., M.M.

Seminar akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 08 April 2026
Pukul : 13.00 s.d 14.00
Tempat : Ruang Ujian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Untuk : 1. Membimbing, mengarahkan dan menilai proposal skripsi yang telah disusun Mahasiswa (i) sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang berlaku pada IAIN Parepare;
 2. Melaporkan hasil kepada pelaksana Seminar proposal skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare tahun 2026.

02 April 2026
 Dekan,

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP.197102082001122002

Tembusan:
 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Ketebagaan
 2. Kabag. Administrasi Umum, Akuntansi dan Keuangan

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
 Token : vyWG1ghc

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS FEBI Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	INSTRUMEN PENELITIAN

LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA

NAMA MAHASISWA : FITRI BUHARI

NIM : 2220203860202031

FAKULTAS : FEBI

PRODI : EKONOMI SYARIAH

JUDUL : PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT
DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH
KELURAHAN KASSA KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

1. Apakah bantuan PKH membantu Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga sehari-hari seperti makanan dan kebutuhan rumah tangga?
2. Setelah menerima bantuan PKH, apakah keluarga Bapak/Ibu lebih mudah memperoleh layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, atau pengobatan?
3. Apakah bantuan PKH membantu biaya pendidikan anak, seperti perlengkapan sekolah, transportasi, atau kebutuhan pendidikan lainnya?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah bantuan PKH membuat keluarga lebih tenang dalam menjalankan kehidupan dan ibadah sehari-hari?

5. Apa saja manfaat terbesar yang dirasakan keluarga setelah menerima bantuan PKH?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah masih terdapat kendala atau kekurangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)?

Wawancara Untuk Pendamping Sosial PKH

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kassa dalam membantu kesejahteraan masyarakat miskin?
2. Menurut Anda, apakah bantuan PKH sudah membantu masyarakat dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar keluarga?
3. Bagaimana bentuk pembinaan atau pendampingan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH?
4. Faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan pelaksanaan PKH di Kelurahan Kassa?
5. Kendala atau hambatan apa saja yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PKH?
6. Menurut Anda, apakah Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan tujuan kesejahteraan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya menjaga agama, jiwa, dan akal?

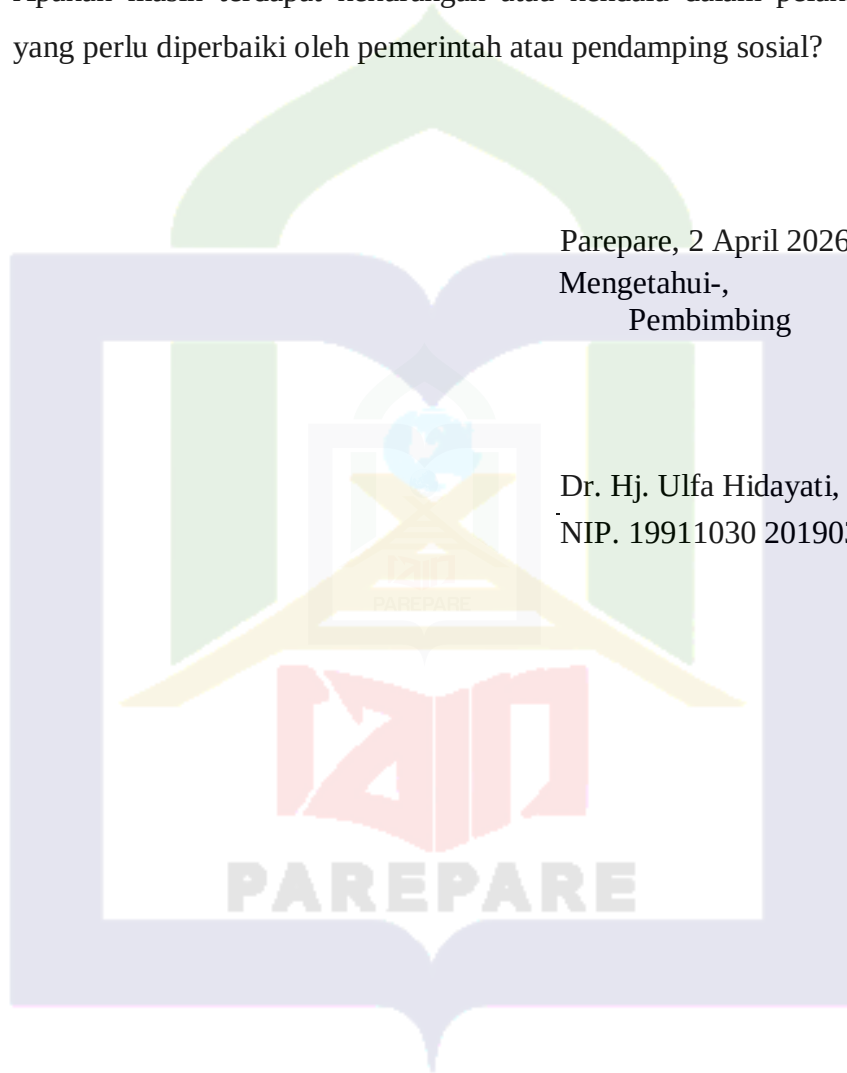
Wawancara Untuk Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kassa?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah PKH membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat?
3. Apakah masyarakat penerima PKH mengalami perubahan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kondisi kehidupan sehari-hari?

4. Bagaimana pengaruh PKH terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat penerima bantuan?
5. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan PKH di lingkungan masyarakat?
6. Apakah masih terdapat kekurangan atau kendala dalam pelaksanaan PKH yang perlu diperbaiki oleh pemerintah atau pendamping sosial?

Parepare, 2 April 2026
Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Hj. Ulfa Hidayati, M.M.
NIP. 19911030 201903 2 016



LAMPIRAN 3. Surat Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1332/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2026 30 April 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: FITRI BUHARI
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 14 Agustus 2004
NIM	: 2220203860202031
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: KEL. KASSA, KEC. BATULAPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH PADA KELURAHAN KASSA KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 01 Mei 2026 sampai dengan tanggal 01 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Page : 1 of 1, Copyright© afs 2015-2026 - (nailul) Dicetak pada Tgl : 30 Apr 2026 Jam : 13:18:50

LAMPIRAN 4. Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0242/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2026
 Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 05-05-2026 atas nama FITRI BUHARI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0246/UT/Teknis/DPMPPTSP/05/2026, Tanggal : 05-05-2026
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0235/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2026, Tanggal : 06-05-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : FITRI BUHARI
 4. Judul Penelitian : PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DININJAU DARI MAQASHID SYARIAH PADA KELURAHAN KASSA KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PENERIMA PKH, PENDAMPING SOSIAL, TOKOH MASYARAKAT
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Batulappa

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 05-11-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Mei 2026



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED SERVICE MANAGEMENT SYSTEM



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN

LAMPIRAN 5. Surat Izin Penelitian Dari Kantor Kelurahan


PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN BATULAPPA
KELURAHAN KASSA
Jl. Poros Bamba - Batulappa No. Kode Pos 91253

SURAT KETERANGAN

Nomor : / KK / V / 2026

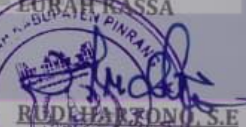
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa mahasiswa **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** :

Nama	: FITRI BUHARI
NIM	: 2220203860202031
Tempat/Tgl Lahir	: Pinrang, 14 Agustus 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang
Program Studi	: Ekonomi Syariah

Diberikan izin melakukan penelitian di Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Berdasarkan Surat rekomendasi penelitian dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikian surat keterangan izin meneliti ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan mestinya.

Bamba, 11 Mei 2026


RUDHARTONO, S.E.
NIP. 197107102002121013



LAMPIRAN 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN BATULAPPA
KELURAHAN KASSA
 Jl. Poros Bamba - Batulappa No. ... Kode Pos 91253

SURAT KETERANGAN

Nomor : / KK / VI / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa mahasiswa **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** :

Nama	: FITRI BUHARI
NIM	: 2220203860202031
Tempat/Tgl Lahir	: Pinrang, 14 Agustus 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang
Program Studi	: Ekonomi Syariah

Benar-benar melakukan Penelitian mulai Tanggal 1 Mei 2026 s/d 1 Juni 2026 di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang untuk menyusun Skripsi dengan Judul **“Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau dari Masqasyid Syariah pada Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang.”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bamba, 1 Juni 2026



LAMPIRAN 7. Surat Keterangan Wawancara

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah Ini

Nama : **SUBURIAH**

Pekerjaan : **IRT**

Menerangkan Bahwa

Nama : Fitri Buhari

Nim : 2220203860202031

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Maqashid Syariah Pada Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana semestinya.

Pinrang, Mei 2026

Narasumber

Suburiah
(Suburiah)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HARTATI

Pekerjaan : I.R.T

Menerangkan Bahwa

Nama : Fitri Buhari

Nim : 2220203860202031

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah

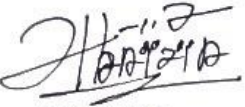
Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Maqashid Syariah Pada Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana semestinya.

PAREPARE

Pinrang, Mei 2026

Narasumber


(...HARTATI...)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah Ini

Nama : LUKMAN

Pekerjaan : Kep. Lingkungan

Menerangkan Bahwa

Nama : Fitri Buhari

Nim : 2220203860202031

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Maqashid Syariah Pada Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang"**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana semestinya.

Pinrang, Mei 2026

Narasumber


(LUKMAN)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah Ini

Nama : *A R D I*
Pekerjaan : *Pendamping PKH*

Menerangkan Bahwa

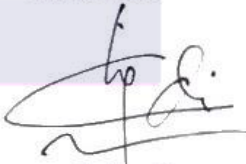
Nama : Fitri Buhari
Nim : 2220203860202031
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Maqashid Syariah Pada Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana semestinya.

Pinrang, Mei 2026

Narasumber


(*A R D I*)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Parida

Pekerjaan : RT

Menerangkan Bahwa

Nama : Fitri Buhari

Nim : 2220203860202031

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Maqashid Syariah Pada Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana semestinya.

Pinrang, Mei 2026

Narasumber

Fitri
(...Parida...)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah Ini

Nama : INA

Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa

Nama : Fitri Buhari

Nim : 2220203860202031

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

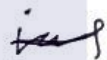
Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Maqashid Syariah Pada Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana semestinya.

Pinrang, Mei 2026

Narasumber


(INA.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SANARIA

Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa

Nama : Fitri Buhari

Nim : 2220203860202031

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah

Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Maqashid Syariah Pada Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang”**

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana semestinya.

Pinrang, Mei 2026

Narasumber


(SANARIA)

LAMPIRAN 8. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Suburiah selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Ibu Hartati selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Ibu Parida selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Ibu Ina selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang



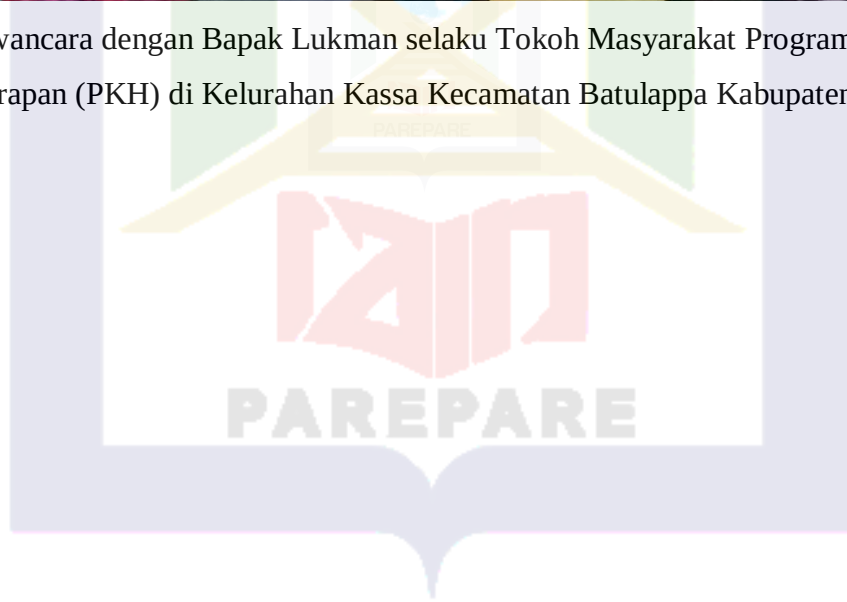
Wawancara dengan Ibu Sanaria selaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Bapak Ardi selaku Pendamping Program Keluarga Harapan
(PKH) di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Tokoh Masyarakat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

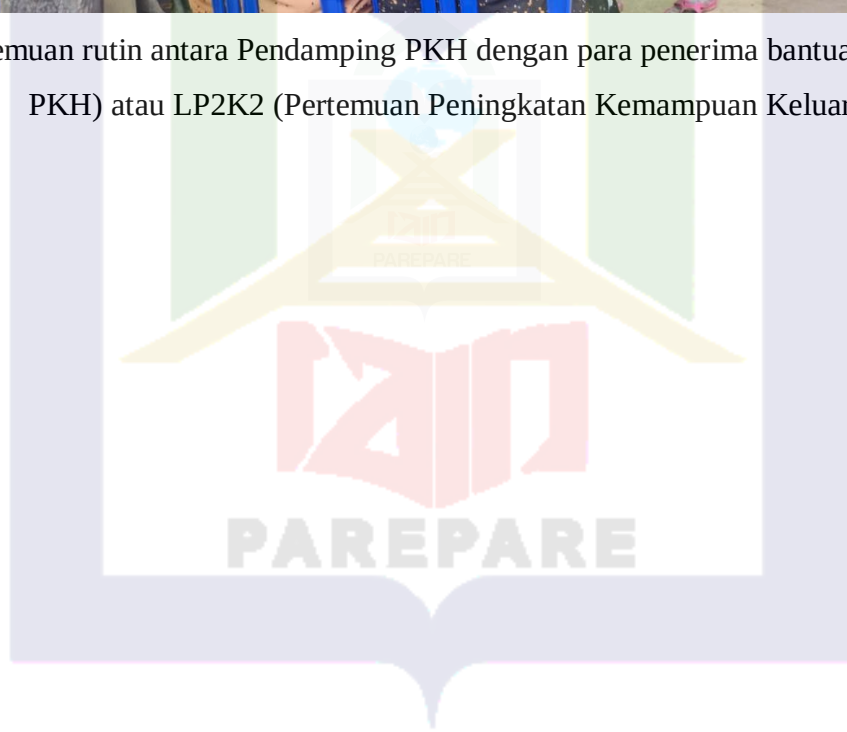


Dokumentasi LP2K2





Pertemuan rutin antara Pendamping PKH dengan para penerima bantuan (sekolah PKH) atau LP2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga)



BIOGRAFI PENULIS



Fitri Buhari, lahir di Pinrang pada tanggal 14 Agustus 2004, anak ketiga dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Buhari dan Ibu Rohani. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 124 Batulappa selama 6 tahun lamanya 2010-2016. Selanjutnya Pendidikan menengah di Pondok Pesantren Tassbeh Baitul Qur'an selama 3 tahun dari 2016-2019. Setelah lulus jenjang SMP, selanjutnya pada tahun 2019-2022, penulis menempuh Pendidikan di SMKN 6 PINRANG. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2022 dan di terima di Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam, sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah. Kemudian penulis melakukan kegiatan KKN di Desa Anabannae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penulis mengajukan skripsi dengan judul “Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mensejahterakan Masyarakat di Tinjau Dari Maqashid Syariah Pada Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang.” Dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.